

**PEMIKIRAN POLITIK NURCHOLISH MADJID TENTANG
RELASI ISLAM DAN NEGARA DI INDONESIA
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah dan
Hukum

Oleh :

MUFLIHUDIN

NPM : 1321020067

Jurusan : Siyasah (Hukum Tata Negara)

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1439 H / 2018 M**

**PEMIKIRAN POLITIK NURCHOLISH MADJID TENTANG
RELASI ISLAM DAN NEGARA DI INDONESIA
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syar'ah dan
Hukum

Oleh:

MUFLIHUDIN

NPM : 1321020067

Jurusan : Siyasah (Hukum Tata Negara)

Pembimbing I : Dr. Iskandar Syukur, M.A

Pembimbing II : Frenki, M.Si

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1439 H / 2018 M**

ABSTRAK

Hubungan Islam dan negara menjadi wacana aktual dan dinamis dalam setiap fase perkembangan peradaban baik di dunia Barat maupun dunia Timur. Perdebatan tersebut berkisar pada masalah bentuk negara, apakah bersifat integral, simbiotik ataukah sekuler. Hubungan Islam dan negara masih terus diperbincangkan melalui media dan diskusi para intelektual Muslim, salah satunya Nurcholish Madjid, merupakan salah seorang pemikir politik Islam di Indonesia dan cendekiawan yang banyak melontarkan gagasan-gagasan yang berwawasan kebangsaan. Salah satunya adalah pemikirannya tentang hubungan Islam dan negara di Indonesia. Pemikirannya ini, meskipun cukup kontroversial ketika pertama kali dilontarkan namun mempunyai pengaruh besar terhadap wacana kebangsaan dan keislaman di Indonesia.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu, pertama bagaimana pandangan Nurcholish Madjid tentang hubungan Islam dan negara di Indonesia. Kedua bagaimana pandangan Fiqh Siyasah terhadap pemikiran Nurcholish Madjid tentang hubungan Islam dan negara di Indonesia. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan buku-buku literatur karya Nurcholish Madjid dan literatur yang berhubungan dengan skripsi ini.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hubungan Islam dan negara adalah suatu distorsi hubungan proporsional antara Islam dan Negara. Negara merupakan aspek kehidupan duniawi yang dimensinya rasional dan kolektif. Sedangkan Islam merupakan segi lain yang dimensinya spiritual dan individual. Meskipun antara Islam dan negara tidak dapat dipisahkan, karena Islam merupakan landasan hidup dan menjadi kultur kehidupan masyarakat dalam bernegara, namun Nurcholish Madjid menolak tegas konsep negara Islam, terutama dalam konteks keindonesiaan. Oleh karena itu, negara Indonesia bukanlah negara agama dan bukanlah negara sekuler. Nurcholish Madjid menegaskan, yang penting adalah bagaimana menjadikan nilai-nilai Islam sebagai etika politik nasional sehingga meskipun tanpa menyebut simbol Islam, substansi Islam itu sendiri sudah terserap ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pandangan Fiqh Siyasah tentang pemikiran Nurcholish Madjid termasuk ke dalam kajian *siyasah dusturiyah*. Meskipun dalam Islam tidak pernah menentukan bentuk dan pola tertentu suatu negara yang harus dipraktikkan oleh umat Islam, namun mendirikan negara merupakan kewajiban umat Islam. Negara merupakan alat bagi umat Islam untuk dapat melaksanakan ajaran-ajaran Islam, sehingga tujuan syara menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan dapat tercapai dalam masyarakat.



**KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 0721703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya maka skripsi saudara.

Nama : Muflihudin
NPM : 1321020067
Jurusan : Siyasah (Hukum Tata Negara)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : PEMIKIRAN POLITIK NURCHOLISH MADJID
TENTANG RELASI ISLAM DAN NEGARA DI
INDONESIA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH.

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Iskandar Syukur, M.A
NIP. 196603301992031002

Frenki, M.Si
NIP. 198003152009011017

Ketua Jurusan Siyasah

Drs. Susiadi AS., M.Sos.I
NIP. 197501292000031001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

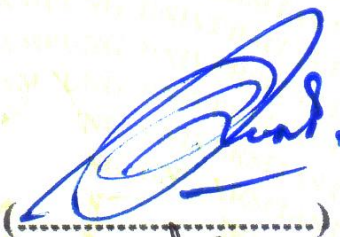
Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 0721703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PEMIKIRAN POLITIK NURCHOLISH MADJID TENTANG RELASI ISLAM DAN NEGARA DI INDONESIA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”** Disusun oleh Nama: **Muflihudin. NPM 1321020067.** Program Studi: **Siyasah (Hukum Tata Negara)**, telah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal: **Jum'at 23 Februari 2018.**

Tim Dewan Penguji

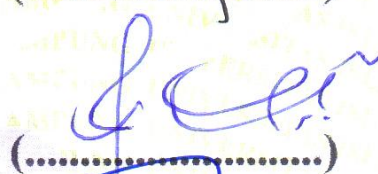
Ketua : Drs. Susiadi AS., M.Sos.I.

()

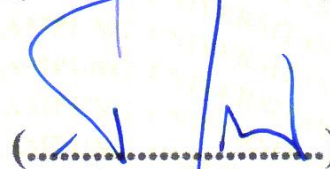
Sekretaris : Hervin Yoki Pradikta, M.H.I.

()

Penguji I : Dr. Jayusman, M.Ag.

()

Penguji II : Frenki, M.Si.

()

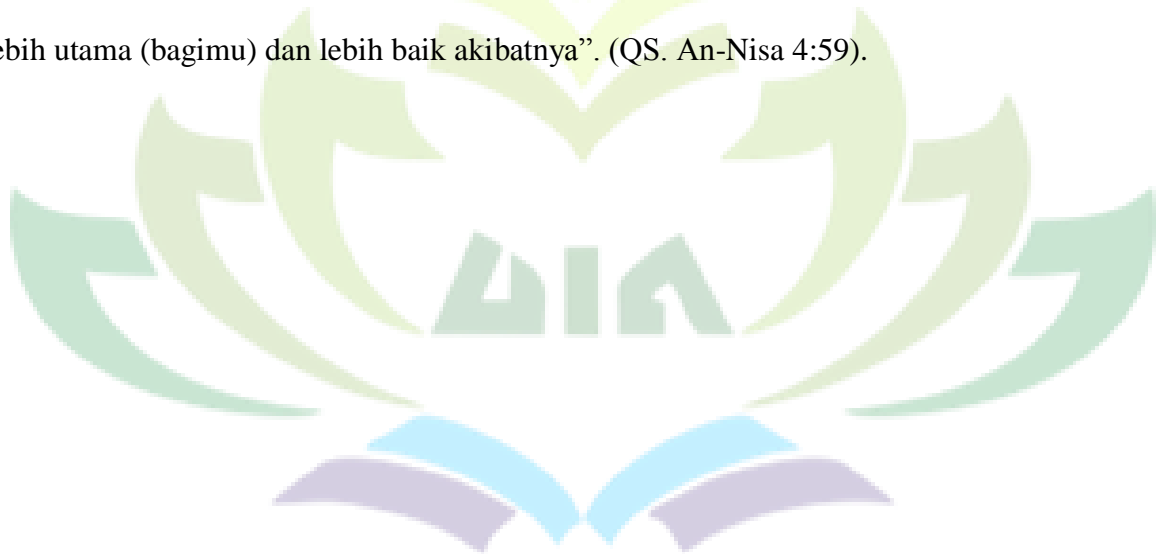
**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Intan Lampung**

**Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag
NIP. 197009011997031002**

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. An-Nisa 4:59).



PERSEMBAHAN

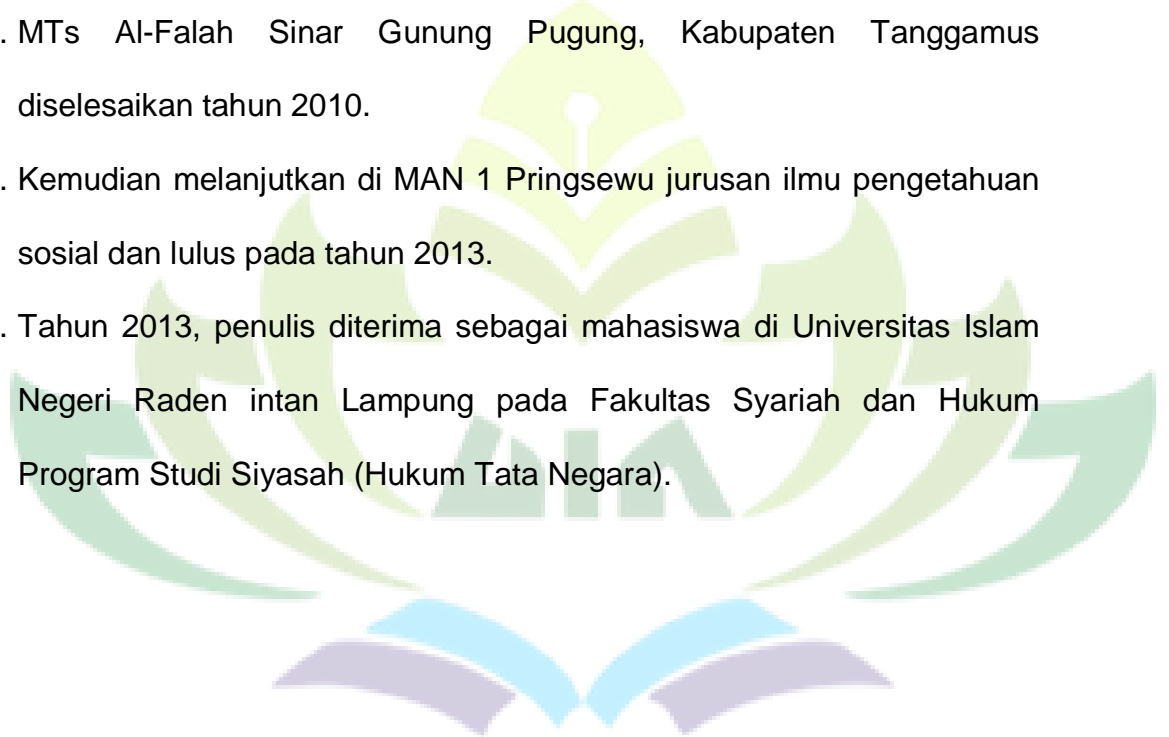
Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan karya kecilku ini untuk orang-orang yang kusayangi sebagai tanda hormat tak terhingga, diantaranya :

1. Kepada orang tuaku tercinta, Ayahanda Arifin dan Ibunda Sumiyati orang yang paling berjasa dalam hidup ini, dan yang selalu ku hormati, yang dengan tulus membesarkan serta mendidik saya hingga sampai sejauh ini, tanpa pernah sedikitpun meminta balas jasa. Semoga Allah SWT membalas semuanya dengan surga-Nya di Akhirat kelak.
2. Kepada Bapak dan Ibu dosen pembimbing, penguji dan pengajar yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik.
3. Sahabat dan teman tersayang tanpa semangat, dukungan dan bantuan dari kalian semua takkan mungkin saya sampai di sini, terimakasih atas semua yang telah kita lewati selama ini. Hanya dengan perjuangan dan kebersamaan kita pasti bisa.
4. Almamaterku Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang aku banggakan.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Muflihudin dilahirkan di Pugung, Tanggamus pada tanggal 08 Agustus 1994, merupakan anak ke enam dari tujuh bersaudara, dari pasangan bapak Arifin dan Ibu Sumiyati. Penulis menyelesaikan pendidikan di:

1. MI Al-Falah Sinar Gunung Pugung, Kabupaten Tanggamus diselesaikan tahun 2007.
2. MTs Al-Falah Sinar Gunung Pugung, Kabupaten Tanggamus diselesaikan tahun 2010.
3. Kemudian melanjutkan di MAN 1 Pringsewu jurusan ilmu pengetahuan sosial dan lulus pada tahun 2013.
4. Tahun 2013, penulis diterima sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri Raden intan Lampung pada Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Siyasah (Hukum Tata Negara).



KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PEMIKIRAN POLITIK NURCHOLISH MADJID TENTANG RELASI ISLAM DAN NEGARA DI INDONESIA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga dan pengikutnya yang taat kepada ajaran agamanya. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Studi Siyasah (Hukum Tata negara), Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, saran dan kritik yang telah diberikan oleh semua pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
2. Drs. Susiadi AS, M.Sos.I. dan Frenki, M.Si selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Siyasah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
3. Dr. Iskandar Syukur, M.A selaku pembimbing I dan Frenki, M.Si. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya

dalam membimbing dan mengarahkan untuk penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang telah banyak membantu dan memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh perkuliahan sampai selesai.
5. Bapak dan Ibu Staf karyawan perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum dan perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung yang turut memberikan data berupa literatur sebagai sumber dalam penulisan skripsi ini.
6. Teman-teman angkatan 2013 khususnya Siyasah (B) yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, terimakasih atas kebersamaan dan perjuangan selama ini.
7. Teman-teman KKN 2016 kelompok 106 yang selalu menyemangati.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan tangan terbuka dan ucapan terimakasih. Namun demikian, penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya. Amin

Bandar Lampung, Januari
2018
Penulis,

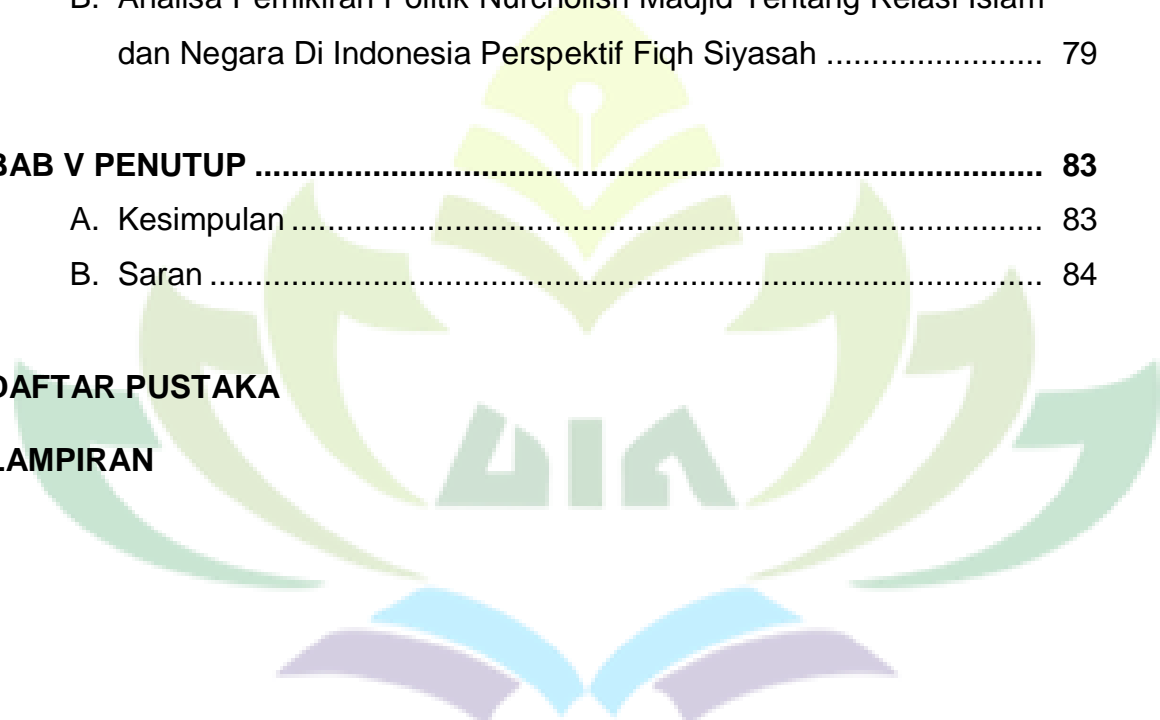
Muflihudin
Npm. 1321020067



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
F. Metode Penelitian	11
BAB II RELASI ISLAM DAN NEGARA DI INDONESIA PERSPEKTIF	
FIQH SIYASAH.....	14
A. Pengertian Politik Islam dan Negara Menurut Fiqh Siyasah	14
B. Hubungan Islam dan Negara Perspektif Fiqh Siyasah	27
C. Hubungan Islam dan Negara di Indonesia Perspektif Fiqh	
Siyasah	36
1. Dasar Negara	44
2. Bentuk Negara.....	49

BAB III PEMIKIRAN POLITIK NURCHOLISH MADJID TENTANG RELASI ISLAM DAN NEGARA DI INDONESIA	53
A. Biografi Nurcholish Madjid.....	53
B. Perjuangan dan Karya-karya Nurcholish Madjid.....	60
C. Pemikiran Nurcholish Madjid tentang Relasi Islam dan Negara di Indonesia	65
BAB IV ANALISA DATA.....	75
A. Relasi Islam dan Negara di Indonesia Menurut Pemikiran Politik Nurcholish Madjid.....	75
B. Analisa Pemikiran Politik Nurcholish Madjid Tentang Relasi Islam dan Negara Di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah	79
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam melaksanakan penelitian ini, penulis memandang perlu untuk menjelaskan istilah-istilah atau poin-poin yang terdapat dalam judul skripsi ini, yaitu **Pemikiran Politik Nurcholish Madjid Tentang Relasi Islam dan Negara di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah.**

Pemikiran adalah memikirkan suatu kebenaran yang sudah ada untuk mendapatkan kebenaran yang baru. Jadi pemikiran berarti suatu pandangan atau pendapat seseorang atau kelompok untuk melahirkan suatu gagasan.¹

Politik adalah seni mengatur dan mengurus negara dan ilmu kenegaraan yang mencakup beraneka ragam kegiatan dalam suatu sistem masyarakat yang terorganisir serta cara bertindak untuk mencapai tujuan tertentu.²

Relasi adalah hubungan atau kaitan, bersangkutan paut, langsung. Jadi Relasi adalah hubungan segala sesuatu yang harus ada kaitannya baik secara keseluruhan atau sebagian secara teratur.³

Islam adalah sebuah agama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul paling akhir untuk menjadi petunjuk atau pedoman hidup bagi seluruh manusia sampai akhir zaman. Di dalamnya terkandung unsur kehidupan manusia, baik dalam aspek *duniawi* maupun

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Ke empat*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2011), h. 725.

²Deni Kurniawan As'ari, *Kamus Istilah Politik dan Kewarganegaraan*, (Bandung: Irama Widya, 2006), h. 133.

³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 8

ukhrawi. Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan yang dilaksanakan melalui ritual ibadah berupa sholat, puasa, zakat, haji dan ibadah lainnya. Akan tetapi Islam juga mengatur antara hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan lingkungan sekitar. Islam memberikan dasar-dasar, norma-norma, prinsip-prinsip dan nilai-nilai kehidupan yang harus diterapkan.⁴

Negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah (*governed*) oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangnya melalui penguasaan (kontrol) monopolistik terhadap kekuasaan yang sah.⁵

Nurcholish Madjid atau populer dipanggil Cak Nur, adalah seorang pemikir Islam, cendekiawan, dan budayawan Indonesia. Cak Nur dianggap salah satu tokoh pembaruan pemikiran dan gerakan Islam di Indonesia yang banyak melontarkan gagasan-gagasan yang berwawasan kebangsaan. Salah satunya adalah pandangannya tentang hubungan Islam dan negara.

Perspektif adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu permasalahan.

Fiqh Siyasah adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.⁶

⁴Abuddin Nata, *Study Islam Komprehensif* (Jakarta: Kencana, 2011) h. v.

⁵Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 49.

⁶Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Prenadamedia, 2014), h. 3.

Berdasarkan istilah di atas, dapat disimpulkan maksud dari judul skripsi ini adalah suatu kajian mengenai Relasi Islam dan Negara di Indonesia melalui pemikiran Nurcholish Madjid ditinjau dari Fiqh Siyasah, serta bagaimana pandangan Fiqh Siyasah terhadap Relasi Islam dan Negara di Indonesia.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun beberapa alasan yang menyebabkan penulis tertarik dan memilih judul tersebut yaitu :

1. Alasan Objektif

- a. Masalah hubungan Islam dan Negara adalah masalah yang selalu aktual diperbincangkan, dan dikaji bahkan diperdebatkan.
- b. Permasalahan politik di Indonesia khususnya hubungan Islam dan Negara dalam politik Islam masih sering diperdebatkan dan menimbulkan implikasi yang mengarah pada perpecahan umat.
- c. Penulis ingin mengetahui bagaimana hubungan Islam dan negara melalui pemikiran politik Nurcholish Madjid Perspektif Fiqh Siyasah.

2. Alasan Subjektif

- a. Permasalahan yang dipilih penulis sangat relevan dengan disiplin ilmu di Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Siyasah.
- b. Tersedianya sarana dan prasarana yang menjadi penunjang penyelesaian skripsi ini, seperti literatur-literatur yang mudah didapatkan di Perpustakaan.

C. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang bersifat universal sehingga harus dapat dibuktikan dan diaplikasikan kepada seluruh umat manusia, tidak terbatas hanya kaum muslim saja. Begitu juga mengenai persoalan antara Islam dan negara. Dalam sejarahnya telah menciptakan kenyataan sosial yang unik. Hubungan antara Islam dan negara dalam sejarahnya memang tidak bisa dilepaskan dari wilayah politik, karena perjalanan negara sebagai entitas sosial merupakan perjalanan politik. Oleh sebab itulah dalam doktrin agama Islam, persoalan kekuasaan dan politik tidaklah terlepas dari pesan-pesan moral agama.⁷

Sedangkan negara merupakan sebuah bangunan yang mencakup seluruh aturan mengenai tata kemasyarakatan yang mempunyai wewenang dalam memaksakan setiap aturan yang dibuatnya kepada masyarakat. Di sini, bisa saja aturan yang dibuat oleh negara sejalan dengan apa yang menjadi sumber acuan masyarakat (agama), tetapi bisa juga berlawanan atau tidak sejalan dengan Islam, tergantung bagaimana sistem yang dianut oleh seluruh negara tersebut, yang kemudian menimbulkan permasalahan antara Islam dan negara.⁸

Hubungan Islam dan negara telah diperdebatkan sejak lama. Bahkan masalah ini dianggap pemicu pertama kalinya konflik politik dan intelektual dalam kaitannya beragama dan bernegara. Dalam perkembangan peradaban manusia, agama senantiasa memiliki hubungan negara. Hubungan Islam dan negara mengalami pasang surut. Ada suatu masa di mana agama dekat dengan

⁷A.M Fatwa, *Satu Islam Multi Partai Membangun Integritas di Tengah Pluralitas*, (Mizan: Bandung, 2000), h. 43.

⁸Yusril Ihza Mahendra, "Islam dan Masalah Kenegaraan", dalam Harun Nasution, *Teologi Islam Rasional Apresiasi Terhadap Wacana Politik dan Praktis*, (Jakarta: Ciputat Press, Cet ke-2, 2002), h. 184.

negara atau bahkan menjadi negara agama atau sebaliknya pada masa-masa agama mengalami ketegangan dengan negara, dalam perjalanannya hubungan Islam dan negara, tentu tidak lepas dari pengaruh sosial budaya atau politik yang melatarbelakanginya.⁹

Sejarah hubungan Islam dan negara di Indonesia selalu mengalami perdebatan yang tidak pernah usai semenjak negara ini didirikan. Pembahasan mengenai hubungan Islam dan negara sesungguhnya tidak saja berasal ketika rapat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) negara Indonesia. Tetapi sudah berlangsung jauh hari diantara para pendiri bangsa. Perbedaan pandangan mengenai hubungan Islam dan negara sudah dimulai sejak sebelum kemerdekaan yakni perdebatan ideologis antara PNI dengan tokoh-tokohnya Soekarno yang mewakili kelompok nasionalis sekuler dengan kalangan Islam dengan tokoh-tokohnya HOS Tjokroaminoto, Agus Salim, Ahmad Hasan dan Muhammad Natsir yang mewakili kelompok nasionalis Islam.

Soekarno berbeda pandangan dengan Muhammad Natsir mengenai masalah hubungan Islam dan negara, Soekarno mendukung gagasan pemisahan Islam dan negara. Menurut Soekarno, agama merupakan urusan spiritual dan abadi, sedangkan negara merupakan persoalan dunia dan kemasyarakatan. Oleh karena itu, Soekarno berpendapat ajaran agama hendaknya menjadi tanggung jawab pribadi dan bukan negara atau pemerintah. Negara dalam hal ini tidak punya wewenang mengatur apalagi memaksakan Islam kepada warga negaranya. Sementara Natsir berpandangan sebaliknya yaitu tidak ada pemisahan antara

⁹Bahtiar Effendy, *Theology Baru Politik Islam: Pertautan Agama, Negara dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Galang Press, 2001), h. 12.

Islam dan negara. Menurut Natsir Islam bukan semata-mata mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga mengatur manusia dengan manusia. Natsir beranggapan bahwa negara adalah lembaga, sebuah organisasi yang memiliki tujuan, lengkap dengan sarafistik serta norma-norma khusus yang diakui umum. Dalam sebuah masyarakat terdapat berbagai lembaga (pendidikan, ekonomi, agama, politik, dan keluarga), negara mempersatukan lembaga-lembaga ini di dalam sistem hukum, mengatur masyarakat yang berbeda-beda. Negara juga berhak memaksa anggotanya mematuhi peraturan dan hukumnya.¹⁰

Perdebatan ini kembali mewarnai politik Indonesia, ketika Soeharto berkuasa bagaimana ketika itu partai Islam yang mengusung Islam sebagai dasar negara tidak diberikan ruang gerak yang signifikan. Soeharto tidak mau membiarkan partai Islam memimpin Indonesia dengan alasan mencoba mendirikan negara Islam dan syariat Islam. Lengsernya Soeharto masih saja perdebatan ini dibahas, perdebatan yang terjadi tidak banyak bergeser dari apa yang diperdebatkan Soekarno dan Natsir, jadi tidak memuat persoalan-persoalan baru.¹¹

Pada masa modern timbul pula permasalahan, antara lain apakah agama harus bersatu dengan negara ataukah harus dipisahkan, apakah Islam memang memerintahkan umatnya untuk membentuk sebuah negara Islam atau tidak. Kalau perintah itu memang ada, bagaimana bentuk dan susunan negara itu, bagaimana

¹⁰Ahmad Suhelmi, *Polemik Negara Islam Soekarno vs Natsir*, (Jakarta: Teraju, 2002), h. 87.

¹¹Asep Saiful Muhtadi, *Komunikasi Politik Indonesia, Dinamika Islam Pasca ORBA*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), h. 80.

sistem dan mekanisme pemerintahannya. Bagaimana kedudukan warga negara non muslim dan sebagainya.¹²

Relasi Islam dan negara, khususnya negara Islam di Indonesia, merupakan suatu topik perbincangan yang hangat dikalangan praktisi politik, tokoh-tokoh cendekiawan Islam dan para intelektualitas Islam. Salah satunya melalui gambaran seorang tokoh politik Islam yaitu Nurcholish Madjid atau sering disapa Cak Nur yang telah menawarkan sebuah paradigma tentang bagaimana umat Islam memandang agama dan negara dalam politik Indonesia, yaitu berupa pandangan bahwa tidak perlunya kaitan formal antara negara dan agama. Hubungan Islam dan negara di Indonesia menurut Nurcholish Madjid meskipun antara Islam dan negara tidak dapat dipisahkan, karena Islam merupakan landasan hidup dan menjadi kultur kehidupan masyarakat dalam bernegara, namun Nurcholish Madjid menolak tegas konsep negara Islam, terutama dalam konteks keindonesiaan. Menurutnya negara Islam merupakan distorsi hubungan proporsional antara Islam dan negara. Oleh karena itu, negara Indonesia bukanlah negara agama dan bukanlah negara sekuler.

Islam tidak perlu menuntut negara atau pemerintah Indonesia menjadi negara atau pemerintah Islam. Baginya adalah substansi atau esensi-esensinya, bukan bentuk formalnya yang simbolis. Pembentukan negara adalah suatu kewajiban bagi umat manusia dalam bentuk demokratis, meskipun tidak ada keharusan dari Islam dalam bentuk negara Islam, karena membentuk negara itu dapat memberikan beberapa prinsip yang dipakai dalam mewujudkan masyarakat

¹²Nurcholish Madjid, "Islam dan Politik" dalam *Jurnal Pemikiran Islam PARAMADINA*, vol. 1, no. 1, Juli-Desember, 1998, h.48.

yang dimaksud, yaitu: *Pertama*, pemerintahan yang adil dan demokratis (musyawarah), *kedua*, organisasi pemerintahan yang dinamis, *ketiga*, kedaulatan.¹³

Begitu juga tentang permasalahan dalam sejarah Islam, yaitu setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW dan siapa yang menggantikan kedudukan beliau sebagai pemimpin umat Islam dimasa akan datang. Ini terjadi karena tidak ada nash dalam Al-Qur'an maupun sunnah Nabi yang secara tegas menjelaskan bagaimana sistem suksesi dan bentuk pemerintahan atau negara setelah Nabi yang harus dijalankan umat Islam. Hal inilah yang melahirkan berbagai pendapat dan penafsiran yang berbeda mengenai aliran politik dalam Islam.¹⁴

Di kalangan ulama-ulama besar Islam yang berbicara tentang hubungan antara Islam dan negara ini antara lain diungkapkan oleh Syekh Mahmud Syaltout sebagai berikut:

*“Tidak mungkin tergambarkan agama Islam tanpa adanya pengarahannya dari masyarakat dan politik negara, karena apabila demikian negara itu tidak bersifat Islami.”*¹⁵

Alasan-alasan dari sarjana yang mengatakan bahwa sesungguhnya agama Islam terpisah dari negara, dengan kata lain agama Islam tidak memberikan ketentuan-ketentuan mengenai masalah politik, tidak menyuruh dan tidak

¹³Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban* (Cet ke-2, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992), h. 255.

¹⁴Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah, Pemikiran*, (Jakarta: UI-Press, 1993), h. vi-vii

¹⁵Ahmad Djazuli, *Op.Cit*, h. 81

memerintah masalah tersebut kembali kepada soal pengalaman-pengalaman umat dan prinsip-prinsip politik.¹⁶

Antara lain yang berpendapat demikian ialah Ali Abd Al-Raziq di dalam kitabnya *Al-Islam wa Ushul al-Hukm*. Beliau beralasan antara lain:

Tidak ada *nash* di dalam Al-Qur'an Surat an Nisa ayat 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An Nisa 4:59).

Pada ayat ini tidak ada hubungan dengan masalah pemerintahan, ayat ini hanya menunjukan bahwa pada kaum muslimin ada kaum yang dikembalikan kepada kaum tadi segala masalah-masalah muslimin dan arti ini sangat luas dan lebih umum dari soal khilafah dalam arti tersebut, bahkan arti ayat tersebut berbeda dengan arti khilafah bahkan hampir tidak berhubungan sama sekali. Menurut Al-Ustadz Ali Abd al-Raziq syiar-syiar agama dan kemaslahatan rakyat tidak tergantung kepada pemerintah dalam bentuk dan macam apapun dari

¹⁶A. Djazuli, *Fiqh Siyasaah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 89.

pemerintahan itu karena Islam tidak memedulikan sesuatu yang tertentu dalam masalah ini.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan Islam dan negara masih terus diperbincangkan melalui media dan diskusi para intelektual muslim, baik golongan yang berpegang kuat pada ajaran agama maupun golongan sekuler. Salah satunya adalah Nurcholish Madjid seorang pemikir politik Islam di Indonesia, oleh karena itu perlu pembahasan lebih lanjut mengenai pemikiran Nurcholish Madjid tentang relasi Islam dan negara di Indonesia perspektif fiqh siyasah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah skripsi ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana relasi Islam dan negara di Indonesia menurut pemikiran politik Nurcholish Madjid ?
2. Bagaimana pemikiran politik Nurcholish Madjid tentang relasi Islam dan negara di Indonesia perspektif Fiqh Siyasah ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pemikiran Nurcholish Madjid tentang relasi Islam dan Negara di Indonesia.
 - b. Untuk mengetahui pemikiran Nurcholish Madjid tentang relasi Islam dan negara di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi hazanah pengembangan ilmu pengetahuan politik dan sistem ketatanegaraan, khususnya yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran untuk Fakultas Syariah dan Hukum khususnya serta masyarakat luas pada umumnya.
- c. Sebagai bahan dan penelitian awal untuk dilakukan penelitian-penelitian berikutnya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan.¹⁷ Metode penelitian juga merupakan seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan permasalahan tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil data, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan pemecahannya. Maka penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan dalam penyusunan skripsi ini termasuk ke dalam penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan beberapa macam materi yang terdapat dalam

¹⁷Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 21

perpustakaan.seperti : naskah-naskah, buku, dokumen ilmiah dan lain-lain.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan suatu objek atau subjek penelitian, pada saat sekarang berdasarkan faktor-faktor yang tampak atau sebagaimana adanya.

2. Sumber Data

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer (pokok) dan data sekunder (tambahan).

a. Bahan Data Primer

Yaitu data yang langsung dapat diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan skripsi ini, seperti buku politik hukum dalam Islam, Fiqh Siyasah, dan buku-buku yang mengandung pemikiran Nurcholish Madjid tentang hubungan Islam dan negara.

b. Bahan Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dari berbagai sumber yang ditulis tokoh politik lainnya yang ada kaitanya dengan judul skripsi ini. Yakni dari buku-buku fiqh politik islam, Al-Qur'an, Al Hadist, dan majalah.¹⁸

¹⁸Rany Kaurur, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Bandung: Taruna Grafika, 2009), h. 38

3. Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu mencari dan mengumpulkan data mengenai suatu hal atau variabel tertentu yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, artikel dan lain sebagainya. Untuk mengumpulkan data yang dimaksud di atas digunakan teknik study kepustakaan (*library research*). Teknik ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menganalisis dan mempelajari data-data yang berupa-bahan pustaka.

4. Pengolahan Data

Setelah penulis memperoleh data yang cukup untuk penulisan skripsi ini, maka selanjutnya penulis melakukan pengolahan data dan pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen sudah dianggap relevan dengan masalah, jelas tidak berlebihan dan tanpa masalah.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan kemudian dianalisis dengan metode induktif, yaitu cara berpikir dari fakta-fakta yang bersifat khusus, peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta dan peristiwa yang konkrit tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

BAB II

RELASI ISLAM DAN NEGARA DI INDONESIA

PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

A. Pengertian Politik Islam dan Negara Menurut Fiqh Siyasah

1. Pengertian Politik Islam

Politik dalam bahasa Arabnya disebut Siyasah, yang selanjutnya kata ini kemudian diterjemahkan menjadi siasat, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut *Politics*. Politik itu sendiri memang berarti cerdik dan bijaksana, yang dalam pembicaraan sehari-hari kita seakan-akan mengartikan sebagai suatu cara yang dipakai untuk mewujudkan tujuan, tetapi para ahli politik sendiri mengakui bahwa sangat sulit memberikan definisi untuk ilmu politik.¹⁹

Dalam catatan sejarah, orang yang pertama memperkenalkan kata politik, adalah Aristoteles (384-322 S.M) seorang filsuf Yunani kuno. Ia mengemukakan, Bahwa manusia adalah makhluk sosial, atau *zoon politicon*. Berangkat dari asumsi tersebut, ia mengawali penjelasannya; bahwa hakikat kehidupan sosial sesungguhnya merupakan politik, karena interaksi satu sama lain dari dua atau lebih orang sudah pasti akan melibatkan hubungan politik. Hal ini merupakan kecenderungan alami dan tak dapat dihindarkan oleh manusia, dan hanya sedikit orang yang cenderung mengasingkan dirinya dari pada bekerja sama dengan orang lain.²⁰

Oleh karenanya, manusia atau seorang individu akan hidup sempurna hanya dapat dicapai dalam suatu wilayah negara, atau dalam suatu organisasi

¹⁹Inu Kencana Syafie, *Ilmu Politik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 9.

²⁰Beddy Irawan Maksudi, *Sistem Politik Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 9.

politik, apa yang kala itu disebut Aristoteles dengan *polis* yaitu dari kata *polistaia*; *polis* berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri (negara) dan *taia* berarti urusan. Jadi, polis adalah suatu organisasi kekuasaan yang diberi wewenang untuk mengurus kesatuan masyarakat dengan menciptakan tata tertib dalam kehidupan bersama di dalam wilayah negara. Karena luas wilayah negara ini pada umumnya sangat kecil dan hanya meliputi daerah seluas satu kota atau desa saja, maka dalam kepustakaan ilmu politik sebutan polis lazim diterjemahkan dengan istilah city state dalam bahasa Inggris atau negara kota.²¹

Dari kata *polis* tersebut dapat diketahui, bahwa politik merupakan istilah (terminologis) yang dipergunakan untuk konsep pengaturan masyarakat, yaitu berkaitan dengan masalah bagaimana pemerintahan dijalankan agar terwujud sebuah masyarakat politik atau negara yang paling baik. Jadi, di dalam konsep ini terkandung berbagai unsur, seperti lembaga yang menjalankan aktivitas pemerintahan, masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan, kebijakan, dan hukum-hukum yang menjadi sasaran pengaturan masyarakat, dan cita-cita hendak dicapai.²²

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, arti politik sebagai berikut: Segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan sesuatu negara atau terhadap negara lain, tipu muslihat atau kelicikan, dan juga dipergunakan sebagai nama bagi sebuah disiplin pengetahuan, yaitu ilmu politik.²³

²¹*Ibid*, h. 10.

²²*Ibid*

²³A. Rahman H.I, *Sistem Politik Indonesia*, (Yogyakarta: Garaha Ilmu, 2007), h. 10.

Miriam Budiardjo mengemukakan politik adalah: Pada umumnya dikatakan bahwa politik (*politics*) adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.²⁴

Menurut Kartini Kartono, dilihat dari struktur dan kelembagaan politik dapat diartikan sebagai sesuatu yang ada relasinya dengan pemerintahan (peraturan, tindakan, pemerintahan, undang-undang, hukum, kebijakan, atau *policy*, dan lain-lain), yakni:

- a. Pengaturan dan penguasaan oleh negara
- b. Cara memerintah suatu teritorium tertentu
- c. Organisasi, pengaturan, dan tindakan negara atau pemerintahan untuk mengendalikan negara secara konstitusional dan yuridis formal
- d. Ilmu pengetahuan tentang kekuasaan.²⁵

Dari berbagai pengertian politik di atas tampak ada perbedaan, namun hal ini menurut Miriam Budiardjo membuktikan bahwa perbedaan itu disebabkan karena setiap sarjana cenderung meneropong hanya salah satu aspek atau unsur politik. Kemudian unsur tersebut diperlakukan sebagai konsep pokok yang dipakai untuk meneropong unsur-unsur lainnya. Konsep-konsep yang dimaksudkan adalah: negara (*state*), kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decision making*), kebijakan (*policy*), pembagian (*distribution*), atau alokasi (*allocation*).

²⁴Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 15.

²⁵Beddy Irawan Maksudi, *Op.Cit*, h. 14.

Istilah politik dalam perspektif Islam, Menurut Suyuthi Pulungan adalah kata politik dalam bahasa Arab disebut *siyasat*, yaitu berasal dari kata *sasa*. Kata ini dalam dalam kamus *al-Munjid* dan *Lisan al-Arab* berarti *mengatur, mengurus, dan memerintah*. *Siyasat* bisa juga berarti pemerintahan dan politik atau membuat kebijaksanaan. Abdul Wahhab Khallaf mengutip ungkapan *Al-Maqrizi* menyatakan, arti kata *siyasa* adalah mengatur. Kata *sasa* sama dengan *to govern, to lead*. *Siyasat* sama dengan *policy (of government, corporation, etc)*. Jadi *Siyasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat, membuat kebijakan, pemerintahan dan politik. Artinya mengatur, mengurus dan membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan adalah *Siyasah*.²⁶

Secara terminologis dalam *Lisan Al-Arab*, *siyasat* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Sedangkan didalam *al-Munjid* disebutkan, *siyasah* adalah membuat kemaslahatan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah. Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikannya sebagai “undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemasyalahatan serta mengatur keadaan.”²⁷ ” Sementara Louis Ma’luf memberikan batasan *siyasah* adalah “membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan”. Adapun Ibnu Manzhur mendefinisikan *siyasah*

²⁶Beddy Irawan Maksudi, *Op,Cit*, h. 15.

²⁷Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Al- Khulafa Ar- Rasyidin*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 26.

“mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan”.

Pada dasarnya definisi-definisi tersebut di atas mengandung persamaan. *Siyasah* berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan negara dengan membimbing mereka dalam kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemudhorotan. Jadi politik Islam juga menentukan corak sosial, ekonomi, hukum, dan berbagai aspek kehidupan bernegara sebagaimana sistem yang diatur dalam *Fiqh Siyasah*.

Dari definisi di atas dapat ditegaskan bahwa wewenang untuk membuat segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan negara dan urusan umat guna mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan. Oleh sebab itu segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan *Siyasah* yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat. Ia wajib ditaati oleh masyarakat selama produk tersebut secara substansial tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku serta tidak bertentangan dengan ajaran Islam, karena pemerintah mempunyai hak untuk ditaati.²⁸

Demikianlah pemahaman istilah politik dilihat dari perspektif Islam, adalah dimaknai sebagai aktivitas untuk mengurus atau mengatur kehidupan umat dalam bernegara atau berbangsa baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, yaitu dengan cara membimbing mereka ke jalan kemaslahatan umat.

²⁸Farid Abdul Khalid, *Fiqh Politik Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2005), h. 2.

2. Pengertian Negara

Istilah negara dalam bahasa asing adalah sebagai berikut (*Staat*) bahasa Belanda artinya negara, (*State*) bahasa Inggris artinya negara, (*E'tat*) bahasa Prancis artinya negara. Dari pengertian ini maka istilah *staat* (*state*, *etat*) dari bahasa latin: status atau *statum* artinya menaruh dalam keadaan berdiri, membuat berdiri, menempatkan.²⁹

Berdasarkan hal tersebut, kemudian istilah negara yang asal-usulnya berasal dari bahasa Sansekerta “nagari” atau “nagara”, yang berarti kota. Dalam bahasa daerah dari suku-suku yang ada di Indonesia menerima arti daerah, wilayah, negeri (Aceh) atau tempat tinggal seorang raja atau pangeran (negeri, negara di pulau Jawa) dan kota, (negeri, Melayu). Dalam bahasa melayu modern istilah negara atau negeri sama artinya dalam bahasa Indonesia. Jadi istilah “negara” dalam sejarah berhubungan dengan wilayah, kota dan penguasa.³⁰

Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, negara adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah alat (*agency*) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Selain itu negara adalah organisasi yang dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Negara menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai dimana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama, baik oleh individu, golongan atau asosiasi,

²⁹Iwan Satriawan, *Ilmu Negara*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 1.

³⁰*Ibid*, h. 2.

maupun oleh negara sendiri. Dengan demikian negara dapat mengintegrasikan dan membimbing kegiatan-kegiatan sosial dari penduduknya kearah tujuan bersama.³¹

A. Definisi Negara Menurut Para Ahli

1. Roger H. Soltau: Negara adalah agen (*agency*) atau kewenangan (*authority*) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat (*The state is an agency or authority managing or controlling these (common) affairs on behalf of and in the name of the community*).³²
2. Wahid Ra'fat, ahli hukum tata negara Mesir, menyebutkan bahwa negara adalah sekumpulan besar masyarakat yang tinggal pada suatu wilayah tertentu yang tunduk kepada suatu pemerintahan yang teratur yang bertanggung jawab memelihara eksistensi masyarakatnya, mengurus kepentingan, dan kemaslahatan umum.³³
3. M. Tahir Azhari, mendefinisikan negara sebagai suatu kehidupan berkelompok manusia yang mendirikanannya bukan saja atas dasar perjanjian bermasyarakat (*contract social*), tetapi juga atas dasar fungsi manusia sebagai khalifah Allah di bumi yang mengemban kekuasaan sebagai amanah-Nya.³⁴
4. Miriam Budiardjo: negara adalah sebagai organisasi kekuasaan atau integrasi dari kekuasaan politik, ia adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah *agency* (alat) dari masyarakat yang mempunyai

³¹Miriam Budiardjo, *Op.Cit*, h. 47.

³²*Ibid*, h. 48.

³³Muhammad Iqbal, *Op.Cit*, h. 151.

³⁴M. Tahir Azhari, *Negara Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 7.

kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat.³⁵

Jadi, sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah (*governed*) oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangnya melalui penguasaan (kontrol) monopolistik terhadap kekuasaan yang sah.

B. Unsur-Unsur Negara

Negara terdiri atas beberapa unsur yang dapat diperinci sebagai berikut:

1. Wilayah

Setiap negara menduduki tempat tertentu di muka bumi dan mempunyai perbatasan tertentu. Kekuasaan negara mencakup seluruh wilayah, tidak hanya tanah, tetapi juga laut disekelilingnya dan angkasa di atasnya.

2. Rakyat atau Penduduk

Setiap negara mempunyai penduduk, dan kekuasaan negara menjangkau semua penduduk di dalam wilayahnya. Dalam mempelajari soal penduduk ini, perlu diperhatikan faktor-faktor seperti kepadatan penduduk, tingkat pembangunan, tingkat kecerdasan, homogenitas, dan masalah nasionalisme.

Rakyat atau penduduk menjadi suatu elemen penting dalam terbentuknya suatu negara. Negara tanpa penduduk tidak dapat disebut

³⁵Miriam Budiardjo, *Op.Cit*, h. 47.

negara karena pemerintahan yang ada dalam negara tersebut tidak ada yang menjalankannya dan juga tidak ada objek yang akan diperintah oleh pemerintah tersebut. Sedangkan pengertian rakyat menurut Wahbah al-Zuhayli mencakup dua unsur yaitu:

1. Unsur materi, yaitu menetap disuatu tempat tertentu
 2. Unsur maknawi, yaitu kehendak untuk hidup bersama.³⁶
3. Pemerintahan yang berdaulat

Salah satu terbentuknya negara adalah pemerintahan yang diakui oleh penduduk (rakyatnya) dimana negara tersebut didirikan. Menurut Lauterpacht, pemerintahan merupakan syarat yang utama untuk adanya suatu negara. Namun jika pemerintahan tersebut ternyata secara hukum atau secara faktanya menjadi negara boneka atau negara satelit dari suatu negara lainnya, maka negara tersebut tidak dapat digolongkan sebagai negara.

4. Pengakuan negara lain

Pengakuan negara lain sebenarnya bukan elemen paling penting mengenai syarat pembentukan suatu negara. Pengakuan dari negara lain merupakan unsur sekunder (*sekundaire staatswording*) mengenai proses terjadinya negara. Pengakuan negara lain terhadap berdirinya suatu negara baru bersifat deklaratif, artinya pengakuan itu hanya bersifat pengumuman saja bahwa suatu negara baru telah berdiri.

³⁶Wahbah al-Zuhayli dalam Jajuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), h. 85.

C. Tujuan dan Fungsi Negara

Negara dapat dipandang sebagai asosiasi manusia yang hidup dan bekerja sama untuk mengejar beberapa tujuan bersama. Dapat dikatakan bahwa tujuan terakhir setiap negara ialah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya (*bonum publicum, common good, common wealth*).

Menurut Roger H. Soltau tujuan negara ialah: Memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin (*The freest possible development and creative self-expression of its members*). Dan menurut Harold J. Laski: Menciptakan keadaan dimana rakyat dapat mencapai keinginan-keinginan mereka secara maksimal (*Creation of those conditions under which the members of the state may attain the maximum satisfaction of theirs desires*).³⁷

Tujuan negara Republik Indonesia sebagai tercantum di dalam undang-undang Dasar 1945 ialah: Untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Pancasila).³⁸

³⁷Miriam Budiardjo, *Op.Cit*, h. 55.

³⁸*Ibid*, h. 55.

Akan tetapi negara, terlepas dari ideologinya, menyelenggarakan beberapa minimum fungsi yang mutlak perlu, yaitu:

1. Melaksanakan Penertiban (*law and order*)
2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya
3. Pertahanan
4. Menegakkan Keadilan

Tujuan pendirian negara tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai oleh umat Islam, yaitu memperoleh kehidupan di dunia dan keselamatan di akhirat. Karena tujuan ini tidak mungkin dicapai hanya secara pribadi saja, maka Islam menekankan pentingnya pendirian negara sebagai sarana untuk memperoleh tujuan tersebut.³⁹

Ibn Abi Rabi menjelaskan tujuan negara dengan pandangan sosiologis historis. Menurutnya, manusia diciptakan Allah dengan watak dan kecenderungan berkumpul dan bermasyarakat. Ini didasarkan pada kenyataan bahwa manusia secara pribadi tidak mungkin mampu memenuhi semua kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain. Mereka membutuhkan orang lain. Namun dalam hubungan ini tidak tertutup kemungkinan mereka tergoda oleh pengaruh-pengaruh jahat. Menurut Ibn Abi Rabi ada tiga kejahatan yang meliputi manusia, yaitu kejahatan yang bersumber dari manusia itu sendiri, kejahatan yang datang dari sesama mereka, dan kejahatan yang datang dari masyarakat lain. Kejahatan pertama dapat dihindarkan dengan mengikuti kehidupan yang baik, mengendalikan diri dan menggunakan akal dalam menyelesaikan persoalan. Kejahatan kedua dapat

³⁹Muhammad Iqbal, *Op.Cit*, h. 154.

dicegah dengan menegakkan dan memenuhi hukum-hukum Allah. Artinya, siapa yang bersalah harus dihukum sesuai dengan ketentuan-Nya. Adapun kejahatan ketiga dapat dihindarkan dengan pembentukan negara. Inilah tujuan negara menurut Ibn Abi Rabi. Dengan pembentukan negara maka manusia dapat menjalankan kehidupannya dengan baik, jauh dari sengketa dan dapat mencegah intervensi dari pihak-pihak asing.⁴⁰

Secara umum, al-Mawardi, menjelaskan bahwa tujuan pembentukan negara (*imamah*) adalah mengganti kenabian dalam rangka memelihara agama dan mengatur dunia (*al-Imamah maudhu'ah li-khilafah al-nubuwwah fi hirasah al-din wa siyasah al-dunya*). Sementara Ibn Khaldun merumuskan tujuan negara adalah untuk mengusahakan kemaslahatan agama dan dunia yang bermuara pada kepentingan rakyat.⁴¹

Dari penjelasan tiga pakar politik Sunni ini dapat ditarik benang merah bahwa tujuan negara dalam Islam bukan hanya untuk duniawi semata, melainkan juga untuk hal-hal yang bersifat ukhrawi. Kedua hal ini tidak dapat dipisahkan. Lebih lanjut, al-Maududi menjelaskan tujuan pendirian negara dalam Islam dengan mengutip ayat Al-Qur'an Surat al-Hadid ayat 25 dan Surat al-Hajj ayat 41.⁴²

⁴⁰*Ibid*, h. 155.

⁴¹*Ibid*.

⁴²*Ibid*.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ
بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ
وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٥٧﴾

Artinya: *Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa. (QS. al-Hadid, 57:25).*

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ
وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٤١﴾

Artinya: *(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan. (QS. al-Hajj, 22:41).*⁴³

Dari dua ayat di atas, al-Maududi menegaskan bahwa kejahatan yang tidak dapat dimusnahkan melalui ajaran Al-Qur'an membutuhkan kekuasaan memaksa dari negara untuk pembasmiannya. Ini berarti, bahwa tujuan negara dalam Islam adalah untuk menegakkan dan melaksanakan kekuasaannya dengan segenap sumber daya yang ada untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik untuk manusia.⁴⁴

⁴³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2017), h. 268.

⁴⁴Muhammad Iqbal, *Op.Cit*, h. 156.

Penjelasan ini mengisyaratkan bahwa negara merupakan alat untuk menerapkan dan mempertahankan nilai-nilai ajaran Islam agar lebih efektif dalam kehidupan manusia. Di samping itu, negara juga didirikan untuk melindungi manusia dari kewenangan-kewenangan satu golongan atau orang terhadap orang atau golongan yang lain. Negara mempunyai kekuatan dan kekuasaan memaksa agar peraturan-peraturan yang diciptakannya dapat dipatuhi sejauh tidak bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Namun demikian, negara sendiri bukanlah tujuan dalam Islam, melainkan hanya sebagai alat atau sarana dalam mencapai tujuan kemaslahatan manusia.⁴⁵

B. Hubungan Islam dan Negara Perspektif Fiqh Siyasah

Diantara para orientalis ada beberapa sarjana yang meyakini bahwa ajaran Islam bukan semata-mata agama, tetapi juga mengatur masalah-masalah negara. Dikalangan jumhur ulama berpendapat bahwa Islam mengharuskan adanya negara dan pemerintahan, di samping itu meskipun jumlahnya kecil ada pula yang hanya membolehkan saja. Dalam hal itu ada pula putra-putra Islam pada zaman mutakhirin ini yang berpendapat bahwa tidak perlu campur tangan agama dalam kehidupan negara.⁴⁶

Orientalis yang meyakini kenyataan sebagaimana tersebut di atas antara lain C.A Nollino yang berkata, “Muhammad telah meletakkan dasar agama dan negara pada waktu yang sama. “Mac Donald mengatakan, “Di sana di Madinah, telah terbentuk negara Islam yang pertama, diletakkan pula prinsip-prinsip yang asasi di dalam aturan-aturan Islam. “Dan H.R. Gibb, menyatakan” pada waktu itu

⁴⁵*Ibid*, h. 157.

⁴⁶*Ibid*, h. 80.

menjadi jelas bahwa Islam bukanlah semata-mata akidah agama yang individual sifatnya, tetapi juga mewajibkan mendirikan masyarakat yang mempunyai *uslub-uslub* tertentu di dalam pemerintahan dan mempunyai undang-undang dan aturan-aturan yang khusus.⁴⁷

Dikalangan ulama-ulama besar Islam yang berbicara tentang hubungan antara Islam dan negara ini diantara lain diungkapkan oleh Syekh Mahmud Syaltout sebagai berikut:

“Tidak mungkin tergambarkan agama Islam tanpa adanya pengarahannya dari masyarakat dan politik negara, karena apabila demikian negara itu tidak bersifar Islami”

Menurut beberapa orang sarjana Islam menyatakan bahwa pemikiran dan persiapan untuk terbentuknya negara Madinah itu telah dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau masih berada di Makkah. Hal ini dikemukakan oleh Abd. Karim Zaedan, M. Yusuf Musa, dan Abdul Kadir Audah.

Abd Karim Zaedan memberikan bukti tentang persiapan tersebut dengan dilangsungkannya *ba'iat aqobah* II. Dari isi *ba'iat* tersebut Abd. Karim Zaedan berkesimpulan bahwa *ba'iat* adalah suatu perjanjian yang jelas (*sharih*) antara kaum muslimin dan Nabi SAW, di dalam pembentukan pertama/persiapan negara Islam serta memberikan kekuasaan kepada Rasulullah SAW dan mengikat kepada orang yang mengadakan *ba'iat* tadi, sedangkan mereka adalah salah satu pihak dalam perjanjian tadi untuk mendengar dan mentaati Rasulullah SAW di dalam melaksanakan wewenangnya di dalam mengatur masalah-masalah negara baru

⁴⁷Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasah :Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group), 2003, h. 80.

tersebut dan kemestian membantunya serta mempertahankannya, inklusif mempertahankan negara baru dan aturan-aturannya ialah undang-undang Islam sebagaimana dapat dipahami dari kata-kata Nabi “*amar ma'ruf nahi munkar*”.⁴⁸

Sedangkan Muhammad Yusuf menjelaskan bahwa Nabi telah memikirkan masalah negara ini ketika beliau masih di Makkah, beliau menunjuk pula *ba'iat Aqobah II* sebagai bukti meskipun segi yang ditinjaunya lain dengan apa yang ditinjau oleh Abd. Karim Zaedan. Abd Kadir Audah juga menyatakan bahwa persiapan di dalam mendirikan suatu negara telah terjadi di Makkah. Beliau tidak menunjuk kepada *bai'at II*, tetapi beliau menarik lebih jauh lagi yang menurut hemat kami persiapan dimaksudkan oleh beliau sesungguhnya persiapan mental.⁴⁹

Alasan-alasan ketiga sarjana tersebut di atas merupakan bukti kemungkinan adanya persiapan di dalam membentuk negara, tetapi alasan-alasan tersebut bukan bukti yang meyakinkan yang menunjukkan bahwa Nabi memang telah mengadakan persiapan-persiapan khusus untuk membentuk negara ketika beliau masih berada di Makkah, sebab terhadap alasan-alasan tersebut dapat diajukan beberapa keberatan:

1. Alasan Abd. Karim Zaedan hanyalah merupakan suatu interpretasi terhadap suatu klausul yang terdapat dalam *bai'at Aqobah*. Interpretasi ini sudah tentu bersifat *dhanny*, sebab interpretasi lain dapat pula diberikan atau mungkin tidak diberikan interpretasi sama sekali, tetapi

⁴⁸*Ibid*, h. 81.

⁴⁹*Ibid*, h. 82.

dilihat *manthuq*-nya. Keberatan ini pun dapat diajukan kepada alasan Yusuf Musa.⁵⁰

2. Persiapan mental yang diajukan oleh Abdul Kadir Audah bukan saja penting untuk kehidupan perorangan, sifat-sifat keberanian, kesabaran dan pengorbanan harus dimiliki pula oleh orang-orang muslim meskipun tidak akan mendirikan suatu negara. Alasan yang paling kuat dari Abdul Kadir Audah adalah surat al-Anbiya:105 bahwa bumi ini diwariskan kepada hamba-hamba Allah yang shaleh:

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ



Artinya: *Dan sungguh telah Kami tulis didalam Zabur sesudah (kami tulis dalam) Lauh Mahfuzh, bahwasanya bumi ini dipusakai hamba-hambaKu yang saleh. (QS. al-Anbiya :105).*⁵¹

Pernyataan bahwa Nabi telah mempunyai pikiran dan persiapan untuk membentuk suatu negara ketika beliau masih di Mekkah merupakan suatu masalah yang perlu diselidiki lebih lanjut. Hanya bagaimanapun juga negara yang pertama bagi orang Arab dan muslimin telah terbentuk di Madinah, sebagaimana dinyatakan oleh Yusuf Musa. Sesuatu yang wajar sekali apabila agama Islam mengajarkan pula masalah-masalah kenegaraan, dengan alasan sebagai berikut:

⁵⁰*Ibid*, h. 82

⁵¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2017), h. 325.

1. Di dalam ajaran Islam kita dapatkan prinsip-prinsip musyawarah, pertanggungjawaban pemerintahan, kewajiban taat kepada pemerintah di dalam hal-hal yang makruf, hukum-hukum di dalam keadaan berperang dan damai, perjanjian antar negara.
2. Negara penting sekali di dalam rangka melaksanakan hukum-hukum Islam. Bahkan sebagian hukum Islam tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya negara seperti hukum pidana.
3. Dikalangan fuqaha kita kenal istilah daru Islam dan darul harb. Darul Islam itu sesungguhnya adalah daulah Islamiah.
4. Sejarah berbicara kepada kita bahwa Nabi juga seorang kepala negara ketika beliau berada di Madinah yang telah kami kemukakan di atas.

Oleh karena itu, jumhur ulama mewajibkan adanya pemerintahan. Kewajiban ini didasarkan kepada ijma'ul sahabat, menolak bencana yang ditimbulkan oleh keadaan yang kacau-balau akibat tidak adanya pemerintahan, melaksanakan tugas-tugas keagamaan dan mewujudkan keadilan yang sempurna.⁵²

Alasan-alasan dari sarjana yang mengatakan bahwa sesungguhnya agama Islam terpisah dari negara. Dengan kata lain agama Islam tidak memberikan ketentuan-ketentuan mengenai masalah-masalah politik, tidak menyuruh dan tidak memerintah masalah tersebut kembali kepada soal pengalaman-pengalaman umat dan prinsip-prinsip politik.

⁵²Hasby Ash-Shiddieqy, *Ilmu Kenegaraan dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Bulan bintang, 1980), h. 50.

Antara lain yang berpendapat demikian adalah Ali Abd Al-Raziq di dalam kitabnya *Al-Islam wa Ushul al-Hukm*.⁵³ Beliau beralasan antara lain:

1. Tidak ada *nash* di dalam Al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 59 dan 83 maupun hadis tentang pemerintahan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa 4:59).

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِيَ الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۚ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ۚ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٣﴾

Artinya: Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil Amri). kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu). (QS. An-Nisa 4:83).⁵⁴

⁵³ Ahmad Djajuli, *Op.Cit*, h. 89.

⁵⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'andan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2017), h. 72.

Pada kedua ayat ini tidak ada hubungannya dengan masalah pemerintahan, kedua ayat ini hanya menunjukkan bahwa pada kaum muslimin ada kaum yang dikembalikan kepada kaum tadi segala masalah-masalah muslimin dan arti ini sangat luas dan lebih umum dari soal khilafah dalam arti tersebut, bahkan arti ayat tersebut berbeda dengan arti khilafah bahkan hampir-hampir tidak berhubungan sama sekali.⁵⁵

2. Adalah kenyataan yang dirasakan yang dikuatkan dengan akal dan disaksikan oleh sejarah masa dahulu dan masa kini bahwa:

Syari'at Islam, manifestasi-manifestasi agama-Nya sejak semula tidaklah tergantung kepada macamnya pemerintahan, seperti yang disebut oleh para fuqaha dengan khilafah dan tidak pula tergantung kepada orang yang digelar "khilafah". Demikian pula kemaslahatan muslimin tidak tergantung kepada satupun dari hal-hal tersebut di atas. Maka kita tidaklah memerlukan kepada khilafah itu, baik untuk masalah-masalah keagamaan kita maupun untuk masalah-masalah keduniawian kita.

Menurut Al-Ustadz Ali Abd al-Raziq syiar-syiar agama dan kemaslahatan rakyat tidak tergantung kepada pemerintahan dalam bentuk dan macam apa pun dari pemerintahan itu karena Islam tidak memedulikan sesuatu yang tertentu dalam masalah ini.⁵⁶ Pendapat Ali Abdur raziq ini dijawab oleh Muhammad al-Hadlar Husein yang dapat diringkas sebagai berikut:

1. Kedua ayat tersebut di atas dan hadis Nabi yang mewajibkan taat kepada *imam*. Dasar ini menunjukkan kepada wajib untuk mengetahui, menetapkan, dan menghasilkannya. (wajib mengangkat *imam*). Alasan

⁵⁵ Ahmad Djazuli, *Op.Cit*, h. 90.

⁵⁶ Ali Abd al-Raziq, *al-Islam wa Usul al-Hukm*, Terjemahan, M. Zaid Su'di, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), h. 94-95.

ini sesungguhnya belum sampai kepada sasaran nya sebab yang paling pokok diperselisihkan adalah pengertian *ulil amri* nya bukan taatnya.

2. Tidak mengangkat *imam* menimbulkan banyak kemudharatan menurut kaidah:

“setiap kemudharatan harus dihilangkan”.

“setiap kewajiban yang tidak sempurna pelaksanaannya kecuali dengan adanya sarana, maka sarana itu pun wajib hukumnya.”

3. Kata-kata *ulil amri* jelas menunjukkan kepada pemimpin *umara* dengan dasar:

- a. Sebab Nuzul: Ayat tersebut turun sehubungan dengan diutusnya Abdullah bin Mudzfallah oleh Nabi.

- b. Telah berkata Ibnu Ujaimah, saya telah bertanya kepada Zaed nim Aslam tentang an-Nisa ayat 59. Menjawab Zaed, “Bacalah sebelum ayat tersebut kau akan tahu.” maka saya baca an-Nisa ayat 58. Berkata Zaed, “Ayat ini mengenai masalah wilayah (kekuasaan).”

- c. Dalam ayat tersebut ada kalimah *faruduhu*. Khitob di sini ditujukan kepada mukminin secara umum, dan diantara mereka adalah *ahlul halli wal aqdi*. Di dalam hal ini barangkali perlu membedakan antara hukum-hukum amaliah dan akidah, di mana untuk hukum-hukum amaliah cukup dengan dalil-dalil yang memberikan faedah *dhani* yang *rajah*, adapun akidah harus dengan bukti-bukti yang *qathi*. *Ijma* di dalam masalah ini adalah dalil yang *qath'i* karena banyaknya bukti-bukti (*syawahid-syawahid*) dari sunnah. Dan

syawahid-syawahid ini kalau dilihat satu persatunya member faedah *dhani* yang *rajah*, tetapi kalau dilihat secara keseluruhan/kelompok member faedah ilmu yang *rajah*.⁵⁷

Yusuf Musa menambahkan alasan-alasan al-Ustadz Husein dan mempertegasnya, beliau berkata bahwa surat an-Nisa ayat 59 adalah dalil yang jelas tentang khilafah, dan kewajiban mengangkat kepala negara. Para ahli tafsir telah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ulil amri adalah para khalifah dan pemimpin (umara), beliau menyitir pendapat-pendapat dari *Imam* Ibnu Jarir Athobari, Al-Imam Fakhruddin Arozi, dan Al-Imam Zamakhsyari dalam menguraikan ulil amri. Sesungguhnya tidaklah masuk akal apabila mewajibkan taat kepada yang tidak wajib diadakan untuk ditaati.⁵⁸

Al-Ustadz Abdul Wahab Khallaf menyimpulkan bahwa Para ulama berbeda pendapat di dalam mengartikan ulil amri ini sebagiannya yaitu yang dipelopori oleh Ibnu Abbas mengatakan bahwa ulil amri berarti ulama, sedangkan yang lainnya mengartikan dengan umara, yang jelas ulil amri meliputi ulama dan umara.⁵⁹

Meskipun hubungan Islam dan negara sangat erat sekali, akan tetapi barangkali salah apabila kita menduga bahwa pikiran-pikiran mengenai negara lebih berpengaruh dan menguasai semua pikiran-pikiran lainnya yang menjelma dalam sistem Islam, sebab jelas apabila demikian akan menyebabkan politik sebagai panglima. Di samping itu, menurut Abdul Wahaf Khalaf hanya 10 ayat saja di dalam Al-Qur'an yang mengenai kenegaraan, ini memberi kemungkinan

⁵⁷ Ahmad Djazuli, *Op.Cit*

⁵⁸ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tatanegara*, h. 141.

⁵⁹ Ahmad. Djazuli, *Op.Cit*, h. 93.

kepada manusia di dalam praktik untuk menggunakan akal sehat di dalam mengatur kenegaraan asal tetap dalam spirit dan prinsip-prinsip umum ajaran Islam.⁶⁰

Oleh karena itu, ide-ide untuk memisahkan antara Islam dan negara di dalam ajaran Islam adalah suatu usaha yang tidak akan menemui sasarannya, karena ia melukiskan dualisme yang tidak ada dalam Islam. Meskipun apa yang dikemukakan bersifat konservatif, tetapi perlu diingat jalan yang terbaik untuk diakui kebenarannya kita dimasa depan adalah terkadang bersifat kolot dengan bertawakal adanya.⁶¹

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa baik secara akal maupun syar'i, mendirikan negara merupakan kewajiban umat Islam. Negara merupakan alat bagi umat Islam untuk dapat melaksanakan ajaran-ajaran Islam, sehingga tujuan syara menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudaratatan dapat tercapai dalam masyarakat.

C. Hubungan Islam dan Negara di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah

Indonesia bukanlah negara sekuler yang memisahkan antara agama (Islam) dan negara. Namun demikian, bukan pula yang berdasarkan pada suatu agama tertentu, akan tetapi Indonesia merupakan negara kesatuan yang memberikan kebebasan kepada warga negaranya untuk memiliki suatu keyakinan dan menganut agama tertentu. Disamping itu dicantumkan secara tegas dalam konstitusi, Islam juga mempunyai peranan penting dalam kehidupan berbangsa

⁶⁰*Ibid*, h. 100.

⁶¹Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 100.

dan bernegara di Indonesia. Hal ini terlihat jelas bagaimana perhatian negara terhadap pelaksanaan kehidupan beragama, sebagaimana termuat dalam visi Indonesia 2020 yang tertera pada TAP MPR Nomor VII/MPR 2001 tentang visi Indonesia masa depan.

Selain menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk suatu agama tertentu, negara juga mengupayakan agar tidak terjadi penistaan terhadap agama tertentu. Hal ini diwujudkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang pernyataan berbagai penetapan presiden dan peraturan presiden sebagai Undang-Undang. Undang-Undang ini diawali dengan adanya penetapan presiden republik Indonesia nomor 1/PNPS tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan atau penodaan agama.

Adapun kerangka berpikir dari keempat alinea pembukaan UUD 1945 berisikan tentang: Pertama, perihal mutlaknya kemerdekaan dan kebebasan bagi manusia sebagai pemikul tanggung jawab kekhalifahan Allah di muka bumi. Kedua, perihal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Ketiga, perihal semangat keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan spiritual moral seluruh gerak dan perjuangan bangsa dalam membangun negara. Keempat, perihal lima prinsip dasar bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia yang hendak dibangun.⁶²

Pancasila sebagai dasar negara harus menjadi jiwa yang menginspirasi seluruh pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai-

⁶²Masdar Farid Masudi, *Syarah UUD 1945 Perspektif Islam*, (Jakarta: PT Pustaka Alvabert, 2013), h. 5.

nilai Pancasila harus menjadi landasan dalam bernegara. Pancasila juga tercantum dalam konstitusi negara meskipun beberapa kali mengalami pergantian dan perubahan konstitusi. Ini menunjukkan bahwa Pancasila merupakan konsensus nasional dan dapat diterima oleh semua kelompok masyarakat Indonesia. Pancasila terbukti mampu memberi kekuatan kepada bangsa Indonesia, sehingga perlu dimaknai, direnungkan, dan diingat oleh seluruh komponen bangsa.⁶³

Dalam syarah UUD 1945 perspektif Islam, dijelaskan bahwa kelima komponen Pancasila sudah sesuai dengan Islam. Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai landasan spiritual yang direfleksikan dalam UUD 1945 sejalan dengan nilai keislaman. Kedua, kemanusiaan sebagai landasan moral dan etika bangsa yang direfleksikan dalam Hak Asasi Manusia, memandang manusia sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah SWT. Ketiga, persatuan sebagai landasan sosial bangsa dan semangat kekeluargaan untuk saling berbagi, saling bekerjasama dalam kebaikan dan ketakwaan demi mencapai tujuan mulia. Keempat, kerakyatan sebagai acuan politik bangsa dan musyawarah untuk mencapai mufakat sebagai prinsip dasar dalam proses pengambilan keputusan diantara pihak yang berkepentingan. Kelima, keadilan sebagai tujuan bersama dalam bernegara yang meliputi semua aspek, seperti keadilan hukum, keadilan ekonomi, dan sebagainya, yang diikuti dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat.⁶⁴

Dalam paparan tersebut bahwa terdapat relasi yang kuat dan saling mempengaruhi antara Islam dan negara di Indonesia. Pengamalan ajaran Islam

⁶³MPR RI, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI-6 Agustus 2012), h. 6.

⁶⁴*Ibid*, h. 143-183.

secara konsekuen-berislam dapat memperkokoh implementasi Ideologi Pancasila dalam konteks kebangsaan. UUD 1945 dan Pancasila meskipun tidak mewakili agama tertentu, tetapi meniscayakan agar seluruh rakyat Indonesia sebagai manusia bertuhan dan beragama, dan wajib mentaati ajaran agamanya. Hal ini bermakna pula bahwa negara menjamin kemerdekaan rakyatnya untuk memilih agama sesuai dengan keyakinannya dan mendorong rakyat untuk taat menjalankan ajaran agamanya, sehingga Pancasila menjadi lebih konkret.⁶⁵

Dari beberapa literatur, terdapat tiga paradigma yang cukup populer dalam wacana relasi Islam dan negara, meski dengan istilah yang beragam. *Pertama*, perspektif integralistik. Paradigma integralistik merupakan paham dan konsep hubungan Islam dan negara yang menganggap keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan dua lembaga yang menyatu. Ini juga memberikan pengertian bahwa negara merupakan suatu lembaga politik dan sekaligus lembaga agama. Paradigma ini melahirkan konsep tentang agama-negara yang berarti bahwa kehidupan kenegaraan menggunakan hukum dan prinsip keagamaan. Oleh karena itu dalam bernegara umat Islam hendaknya kembali pada sistem ketatanegaraan Islam, dan tidak perlu sistem ketatanegaraan Barat. Sistem ketatanegaraan atau politik Islam yang harus diteladani adalah sistem yang dilaksanakan Nabi Muhammad saw dan oleh empat khalifah. Para tokoh yang mengusung paradigma ini antara lain Sayyid Qutub, Muhammad Rasyid Ridha, Hasan al-Bana, al-Turabi, dan Abu al-Maududi.⁶⁶

⁶⁵*Ibid.*

⁶⁶Munawir Sjadzali, *Islam dan Tatanegara*, h. 1-3.

Kedua, perspektif sekuleristik. Paham sekuler memisahkan dan membedakan antara Islam dan negara secara diametral. Dalam negara sekuler, sistem dan norma hukum positif dipisahkan dengan nilai dan norma agama. Norma hukum ditentukan atas kesepakatan manusia dan tidak berdasarkan agama atau firman-firman Allah, meskipun mungkin norma-norma tersebut bertentangan dengan norma-norma agama. Sekalipun ini memisahkan antara Islam dan negara, akan tetapi pada lazimnya negara sekuler membebaskan warga negaranya untuk memeluk agama apa saja yang mereka yakini dan negara tidak intervensi dalam urusan agama. Argumentasi pendukung paradigma ini adalah tidak ada ayat yang secara tegas mewajibkan pembentukan pemerintahan dan negara., sekaligus menekankan bahwa pembentukan pemerintahan tidaklah masuk dalam tugas yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad saw. Beliau hanya rasul yang membawa risalah agama saja, tidak termasuk perintah membentuk negara. Tokoh-tokoh yang mengusung paradigma ini antara lain Ali Abd Raziq, Thaha Husein, Muhammad Said al-Ashmawi, Ziya Gokalp, Sayyid Ahmad Khan, Ameer Ali, Khalifah Abdul Halim, Ghulam Ahmad Parvez serta Nurcholis Madjid dan Abdurrahman Wahid.⁶⁷

Ketiga, perspektif simbiotik. Konsep ini menolak pendapat bahwa Islam adalah suatu agama yang memiliki sistem ketatanegaraan. Namun menolak juga pengertian Barat bahwa Islam hanya mengatur hubungan manusia dengan Maha pencipta. Pendukung konsep ini berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat nilai etika bagi kehidupan

⁶⁷Tim Kajian Ilmiah Abituren, *Simbiosis Negara dan Agama: Reaktualisasi Syari'at dalam Tatanan Kenegaraan*, (Kediri: Lirboyo 2007), h. 28-35.

bernegara. Menurut konsep ini, hubungan Islam dan negara dipahami saling membutuhkan dan bersifat timbal balik. Negara memerlukan agama, karena agama juga membantu negara dalam pembinaan moral, etika, dan spiritualitas. Begitu juga sebaliknya, agama juga membutuhkan negara sebagai instrument dalam melestarikan dan mengembangkan agama.⁶⁸

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa adanya kekuasaan yang mengatur kehidupan manusia merupakan kewajiban agama yang paling besar, karena tanpa kekuasaan negara, maka agama tidak bisa berdiri tegak. Pendapat Ibnu Taimiyah tersebut melegitimasi bahwa antara Islam dan negara merupakan dua entitas yang berbeda, tetapi saling membutuhkan. Oleh karenanya, konstitusi yang berlaku dalam paradigma ini tidak saja berasal dari adanya *social contract*, tetapi bisa saja diwarnai oleh hukum Islam (*syari'ah*). Para tokoh yang mengusung paradigma ini diantaranya Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, Muhammad Natsir, dan Hasbi Ashiddieqy.⁶⁹

Berdasarkan paradigma ini, Indonesia berada pada paradigma yang ketiga, yaitu simbiotik. Faktanya, Indonesia tidak menjadikan Islam sebagai agama negara dan tidak menjadikan Syariah Islam sebagai sumber utama pembuatan hukum. Juga, tidak menjadikan Islam sebagai ideologi politik dan sistem pemerintahan. Indonesia memilih sistem demokrasi yang terintegrasi dalam tiga model. Pertama, Demokrasi Islam yang didukung oleh Muhammad Natsir. Model ini berupaya menerima nilai-nilai politik modern tanpa mengabaikan doktrin-doktrin Islam klasik. Islam sebagai dasar negara yang sifatnya komprehensif

⁶⁸Munawir Sjadzali, *Op. Cit*, h. 1-2.

⁶⁹Nanang Tahqiq, *Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2009), h. 50.

dalam mengatur kehidupan manusia, membumi, dan cocok untuk segala zaman dan tempat. Dengan karakter seperti ini, Islam tidak dapat ditundukkan di bawah sistem manapun.⁷⁰

Kedua, demokrasi agama yang didukung oleh Soeharto dan Amin Rais. Eksponen model ini percaya bahwa Islam tidak secara khusus menyuruh kaum muslim untuk mendirikan tipe institusi politik tertentu, yang ditekankan Islam adalah mendirikan masyarakat yang sepenuhnya berkomitmen pada prinsip-prinsip dasar agama seperti keadilan, kesetaraan, dan kebebasan. Semua prinsip itu bisa saja terkandung di dalam sisten politik secara khusus dan formal menentukan Islam sebagai dasarnya. Ketiga, demokrasi liberal yang menegaskan bahwa urusan politik harus dibahas dan dilaksanakan di luar wilayah agama. Diantara pendukung model ini adalah Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid. Argumennya adalah bahwa Islam pertama-tama adalah agama moral. Eksponen model ini menganggap ucapan Nabi “kalian lebih tau mengenai urusan dunia” sebagai rujukan yang kokoh bagi proses sekulerisasi Islam. Mereka meyakini bahwa hadis itu secara eksplisit memberikan nasehat kepada umat Islam untuk membedakan urusan dunia dengan akhirat.⁷¹

Nurcholish Madjid menjelaskan bahwa Islam pada hakikatnya sejalan dengan semangat kemanusiaan universal. Namun, pada pelaksanaan ajaran tersebut harus disesuaikan dengan pengetahuan dan pemahaman tentang lingkungan sosio kultural masyarakat yang bersangkutan. Konseptualisasi ajaran ini terkait dengan ruang dan waktu. Baginya negara adalah salah satu segi

⁷⁰Luthfi Assyaukanie, *Ideologi Islam dan Utopia: Tiga Model Negara Demokrasi di Indonesia*, (Jakarta: Freedom Institute, 2011), h. 21.

⁷¹Nanang Tahqiq, *Op.Cit*, h. 52.

kehidupan duniawi, yang dimensinya adalah rasional dan kolektif. Sedangkan Islam adalah aspek kehidupan lain yang dimensinya adalah spiritual dan pribadi. Antara Islam dan negara memang tidak bisa dipisahkan, namun antara keduanya itu tetap harus dibedakan dalam dimensi dan cara pendekatannya.⁷²

Hubungan antara Islam dan negara di Indonesia mencerminkan upaya untuk mencari kompromi atau jalan tengah diantara kepentingan ideologis. Pancasila akhirnya diterima sebagai jalan kompromi antara kalangan agamis-nasionalis, yang menginginkan Islam sebagai dasar negara, dan kalangan nasionalis-sekuler. Di situ negara Indonesia dibayangkan sebagai, dalam istilah Mukti Ali yang terkenal, “bukanlah negara teokratis, dan juga bukan negara sekuler”. Faktanya di Indonesia, Umat Islam masih bebas menjalankan syariat Islam, bahkan masih dibebaskan untuk memilih dan menyatakan sikap sesuai hati nuraninya.⁷³

Dalam Islam tidak relevan adanya pemisahan agama dari negara. Nilai-nilai Universal Islam tidak dapat dipisahkan dari ide pembentukan sebuah negara. Negara hanya merupakan instrumen, bukan tujuan. Oleh sebab itu diperlukan pedoman untuk mengatur negara supaya kuat dan subur serta menjadi media yang baik untuk mencapai tujuan hidup keselamatan dan kesejahteraan manusia yang terhimpun dalam negara tersebut.⁷⁴

Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 menjadi dasar hukum Indonesia. Menjadi justifikasi kuatnya relasi antara Islam dan negara. Berdasarkan

⁷²Budhy Munawar Rahman, *Reorientasi Pembaruan Islam*, (Jakarta: Democracy Project, 2011), h. 357.

⁷³Nanang Tahqiq, *Op.Cit*, h. 68.

⁷⁴Moh. Natsir, *Op.Cit*, h. 433.

hal ini, sudah sepatutnya umat Islam yang menjadi warga negara Indonesia berislam dengan *kaffah* dan bernegara dengan baik. Mengamalkan setiap aturan dalam Islam dan mengikuti setiap peraturan negara selama tidak bertentangan dengan syariat. Terutama dalam hal agama dan pesan sentralnya adalah bagaimana menerjemahkan nilai-nilai Islam yang bersifat subjektif ke dalam tataran yang lebih objektif dan inklusif sehingga bisa memayungi semua agama yang berbeda satu sama lain. Semua komponen agama Islam yang sebaiknya diformulasikan terlebih dahulu ke dalam terminologi objektif yang dapat diterima oleh semua pihak.

Konsep *tauhid* misalnya, diterjemahkan dengan ketuhanan yang maha Esa, konsep *shura* dengan musyawarah, dan konsep *baladatun tayyibatun warabbun ghafir* dengan negara kesejahteraan di bawah naungan Tuhan. begitu pula konsep-konsep Islam lainnya seyogyanya dibingkai ke dalam istilah yang universal, seperti keadilan, persamaan antar manusia, kebebasan, kemakmuran dan demokrasi. Seluruh istilah tersebut terdapat dalam ajaran prinsipil Islam namun bersifat inklusif dan mampu merangkul semua orang tanpa memandang golongan, agama, suku, kelompok, warna kulit dan bangsa. Dengan demikian, Islam benar-benar mampu mengimplementasikan misi umatnya sebagai *rahmatat lil alamin*, sebagai penebar kasih sayang Tuhan kepada seluruh makhluk-Nya walaupun tidak menggunakan simbol *khilafah* atau negara Islam.

1. Dasar Negara

Dasar negara republik Indonesia adalah Pancasila yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 dan secara resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18

Agustus 1945, kemudian diundangkan dalam berita Republik Indonesia tahun II No. 7 bersama-sama dengan batang tubuh UUD 1945. Di dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 dicantumkan kata-kata:⁷⁵

maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan Berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan Serta dengan Mewujudkan Suatu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini kita melihat dasar negara kita Republik Indonesia adalah Pancasila yang susunannya sebagaimana tersebut di atas.

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁷⁶

Dasar negara di dalam ajaran Islam sudah tentu Islam, seperti dinyatakan oleh Soekarno. Oleh karena itu, tepat pula keputusan Kongres Alim Ulama dan Mubaligh Islam yang berlangsung di Medan pada tanggal 11s/d 15 April 1953, di mana dinyatakan pada poin 2: “Dasar negara, negara berdasar Islam”. Walaupun demikian, harus mendapat perhatian kita tentang penjabaran dari ajaran Islam itu

⁷⁵Ahmad Djazuli, *Op.Cit*, h. 102.

⁷⁶Jimly Asshiddique, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 210.

sendiri, penjabaran dari filsafat kenegaraannya. Diantara para ulama yang telah menjabarkan falsafah kenegaraan Islam ini antara lain *Al-Imam* al-Akbar Mahmud Syaltout, beliau merumuskan *asasud daulah fil Islam* sebagai berikut: ⁷⁷

1. Al-Ukhuwah al-Diniyah

Dasar dari ukhuwah ini seperti dinyatakan Al-Quran dan Hadis Nabi SAW dan jelas persaudaraan *imam* ini melampaui hubungan-hubungan lainnya, yang dituntut dari seorang muslim kesusahan apabila saudaranya sesama muslim susah dan memberikan pertolongannya. Hal ini diperkuat lagi oleh Al-Qur'an dan hadis-hadisnya lainnya.

2. Al-Takaful al-Ijtima'i

Al-Takaful al-ijtima'i ini merupakan konsekuensi logis dari ukhuwah *addiniyah* tadi, *At-Takaful ijtima'i* ini mempunyai dua jurusan, jurusan pertama adalah bersifat material, di sini letaknya zakat, infak; jurusan yang kedua bersifat immaterial dan di sini letaknya *amar ma,ruf nahi munkar*, nasihat-nasihat, pendidikan, hal ini erat hubungannya dengan *nash* Al-Qur'an (surat ali Imran ayat 104 dan surat at-Taubah ayat 71).

3. As-Syura

Musyawarah ini adalah dasar pemerintahan yang baik, bahkan di dalam Al-Qur'an sendiri ada salah satu surat yang disebut dengan surat As-Syura, ayat 38. Juga didalam ayat lain yaitu surat ali Imran,

⁷⁷Ahmad Djazuli, *Op.Cit*, h. 103.

ayat 159. Musyawarah ini juga telah dilakukan baik pada masa Rasulullah maupun pada masa sahabat dan dasar dari musyawarah ini adalah jaminan kebebasan yang sempurna di dalam menyatakan pendapat selama tidak menyinggung dari pokok-pokok akidah dan ibadah.

4. Al-Adl

Baik dalam ayat-ayat Makiyah maupun Madaniyah kita mendapatkan kata-kata keadilan dan sebaliknya baik dalam ayat-ayat Makiyah maupun Madaniyah kita mendapatkan pula kata-kata lawan dari keadilan ini yaitu kezaliman. Jelas adil di sini bersifat umum di samping kita pun menerima keadilan yang bersifat khusus, misalnya di lapangan perkawinan (surat an-Nisa ayat 2 dan 3), di lapangan janji (utang piutang al-Baqarah ayat 282, an-Nisa ayat 135), di lapangan yudikatif surat an-Nisa ayat 58).

Di dalam bukunya yang lain Muhammad Syaltout juga mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah *dustur* yang *am'* yang kekal tidak berubah, dan di samping itu beliau mengatakan bahwa hubungan yang kuat yang mengikat umat.⁷⁸ Kalau kita perhatikan jelas apa yang dikemukakan oleh Syekh Mahmud Syaltout di dalam bukunya *Min Taujihatil Islam* yang merupakan unsur-unsur yang mengikat suatu umat sesungguhnya adalah:

⁷⁸*Ibid*, h. 104.

1. Pengakuan bahwa kekuasaan yang mutlak ada pada Allah Rabbul Alamin ini di dalam praktik menghendaki pengakuan terhadap Allah SWT.
2. *Al-Ukhwah al-Insaniyah*, hasilnya menimbulkan perikemanusiaan di dalam segala tindakan.
3. *Al-Ukhwah fi al-Imam*, yang mengakibatkan persatuan bagi setiap muslim/persatuan umat.
4. Sedangkan kesatuan di dalam menyebarkan Islam dan pertanggungjawaban bersama untuk keselamatan agama, individu, dan jamaah yang dilakukan dengan jalan musyawarah adalah termasuk *takaful ijtima*.
5. *Wihdatu Attaklif* sesungguhnya salah satu aspek dari keadilan.

Dengan dasar yang telah diletakkan oleh Syekh Muhammad Syaltout tersebut barangkali kita dapat menarik suatu kesimpulan bahwa dasar negara di dalam ajaran Islam ini adalah:

1. Pengakuan kepada Allah SWT, yang mempunyai kekuasaan mutlak.
2. Perikemanusiaan.
3. *Ukhwah Islamiah*.
4. *Al-Takaful al-Ijtima'i*/Tanggung jawab sosial.
5. Keadilan.⁷⁹

⁷⁹*Ibid*, h. 105.

Hasbi ash-Shiddiqy di dalam bukunya “Asas-asas Hukum Tata Negara menurut syariat Islam” menjabarkan dua buah ayat surat An-Nisa yaitu ayat 58 dan 59 menjadi “pancadasar pemerintahan Islam”, yaitu:

1. Menunaikan amanah
2. Menegakkan keadilan
3. Menaati Allah dan Rasul-Nya.
4. Menegakkan kedaulatan rakyat dengan jalan menegakkan permusyawaratan/perwakilan rakyat dan mengangkat kepala negara menurut kehendak rakyat.
5. menjalankan hukum-hukum dan undang-undang dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya.⁸⁰

Apa yang dikemukakan oleh T.M Hasbi Ash Shiddieqy sesungguhnya tidak bertentangan dengan apa yang dikemukakan oleh Syekh Mahmud Syaltout, bahkan saling menjelaskan. Sebab menunaikan amanah dan menegakkan keadilan oleh Mahmud Syaltout dimasukkan dalam istilah keadilan. Sedangkan menaati Allah dan rasul-Nya adalah konsekuensi logis dari pengakuan terhadap kekuasaan Allah SWT yang bersifat mutlak, selanjutnya adalah permusyawaratan dan menjalankan hukum-hukum dan undang-undang termasuk ke dalam *attakaful ijtima'i*.

2. Bentuk Negara

Bentuk negara merupakan batas antara peninjauan secara sosiologis dan peninjauan secara yuridis mengenai negara. Disebut peninjauan secara sosiologis

⁸⁰*Ibid.*

yaitu apabila negara dilihat secara keseluruhan (*ganzhit*) tanpa melihat isinya dan sebagainya. Disebut peninjauan secara yuridis yaitu apabila negara hanya dilihat dari isinya atau strukturnya. Maka jika bentuk negara dilihat secara sosiologis akan terbagi dua yaitu negara kesatuan atau negara federasi. Namun jika dilihat dari isinya atau strukturnya maka akan tertuju pada monarki, tirani, aristokrasi, oligarki, plutokrasi, politeia dan demokrasi.⁸¹

Sedangkan Jimly Asshiddique, dalam bukunya *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, membedakan adanya empat macam susunan organisasi negara, yaitu:⁸²

1. Negara Kesatuan (*Unitary State, Eenheidsstaat*)
2. Negara Kesatuan atau Federal (*Federal State, Bondsstaat*)
3. Negara Konfederasi (*Confederation, Statenbond*).

Disamping itu, ada yang hanya membagi negara ke dalam dua bentuk negara yaitu negara kesatuan dan negara federal. Ciri khas dari negara kesatuan ialah:

1. Adanya supermasi dari Parlemen atau Lembaga Perwakilan Rakyat Pusat, dalam kasus Indonesia adalah MPR.
2. Tidak adanya badan-badan bawahan yang mempunyai kedaulatan.

Contoh dari negara-negara kesatuan antara lain Republik Indonesia, Jepang, Britania Raya, Perancis dan Belgia. Bukti bahwa Republik Indonesia adalah negara kesatuan dapat dilihat dalam pasal 18 UUD 1945, dan dalam pasal 18A dan 18B Amandemen UUD 1945.

⁸¹Iwan Satriawan, *Op.Cit*, h. 88.

⁸²Jimly dalam Meksasai Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), h. 119.

Sedangkan ciri khas dari negara federal adalah:

1. Adanya supermasi dari konstitusi di mana federasi itu terwujud.
2. Adanya pembagian kekuasaan negara-negara federal dan negara-negara bagian.
3. Adanya suatu lembaga yang diberi wewenang untuk menyelesaikan satu perselisihan antara pemerintah federal dan pemerintahan bagian.⁸³

Jadi, kekuasaan yang ada di dalam negara kesatuan tidak dapat dibagi-bagi. Sedangkan di dalam negara federal ada pembagian kekuasaan antara negara-negara bagian dan negara federal. Contoh dari negara federal antara lain: Amerika Serikat, Kanada, Australia. Adapun di dalam serikat negara-negara kedaulatan nasional dari negara yang bergabung tidak berubah.

Kalau kita melihat ke belakang ke zaman Rasulullah dan Khulafa al-Rasyidin jelas tampak bahwa Islam dipraktikkan di dalam ketatanegaraan sebagai negara kesatuan, di mana kekuasaan terletak pada pemerintahan pusat, gubernur-gubernur dan panglima-panglima diangkat serta diberhentikan oleh khalifah, hal ini berlangsung sampai jatuhnya Daulah Umawiyah di Damaskus. Kemudian timbul tiga kerajaan besar Islam yang tampaknya terpisah satu sama lain yaitu Daulah Abbasiyah di Baghdad, Daulah Uluwiyah di Mesir, dan Daulah Umawiyah di Andalusia. Meskipun ketiga pemerintahan itu terpisah akan tetapi kaum muslimin sebagai umat di mana saja dia berada, bahasa apa saja yang dipakai dan ke dalam kebangsaan apa pun dia termasuk, dia tetap mempunyai

⁸³Fahmi Amrusyi dalam Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Nusamedia, 2012), h. 28.

hak-hak yang sama sebagai kaum muslimin yang lain. Oleh karena itu, walaupun dunia Islam pada waktu itu terpecah menjadi tiga pemerintahan akan tetapi kaum muslimin menganggap atau seharusnya menganggap ketiganya ada di dalam wilayah darul Islam.⁸⁴



⁸⁴ Ahmad Djazuli, *Op.Cit*, h. 105.

BAB III

PEMIKIRAN POLITIK NURCHOLISH MADJID TENTANG RELASI ISLAM DAN NEGARA DI INDONESIA

A. Biografi Nurcholish Madjid

Nurcholish Madjid adalah seorang putra kelahiran Mojoanyar, Jombang, Jawa Timur, Tanggal 17 Maret 1939 Masehi. Bertepatan dengan 26 Muharram 1358 Hijriyah. Dia dilahirkan dari kalangan keluarga pesantren. Ayahnya adalah K.H Abdul Madjid, seorang kyai jebolan pesantren Tebuireng, Jombang yang didirikan oleh pendiri Nahdatul Ulama (NU) Hadaratus Syaikh Hasyim Asy'ari, yang mana beliau adalah salah seorang diantara Faunding Father Nahdatul Ulama. Sementara ibunya adalah adik dari Rais Akbar NU dari ayah seorang aktivis Syarikat Dagang Islam (SDI) di Kediri yang bernama Hajjah Fathonah Mardiyah.⁸⁵

Nurcholish Madjid lahir sebagai anak sulung dari empat bersaudara. Panggilan Nurcholish Madjid yang terkenal adalah Cak Nur. Keseharian beliau adalah apabila beliau belajar di sekolah rakyat, sorenya ia mengaji di Madrasah al-Wathaniyah, pimpinan ayah kandungnya sendiri. Ayahnya kebetulan mempunyai koleksi buku yang terbilang lengkap, sehingga Nurcholish Madjid saat kecil dari pada bermain lebih baik membaca kitab-kitab yang dimiliki ayahnya.⁸⁶

Nurcholish Madjid meninggal pada tanggal 29 Agustus 2005 dalam usia 66 tahun. Ia adalah salah satu pemikir Islam terbaik Indonesia yang telah

⁸⁵Siti Nadroh, *Wacana Keagamaan dan Politik Nurcholish Madjid* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 21.

⁸⁶Ahmad A. Sofyan dan M. Roychan Majid, *Op.Cit.*, h. 71.

mengontribusi pemikiran-pemikiran keislaman kontemporer, khususnya dalam apa yang ia sebut pada tahun 1990 sebagai mempersiapkan umat Islam Indonesia memasuki zaman modern.

Pendidikan dasar Nurcholish Madjid ditempuh di dua sekolah tingkat dasar, yaitu di sore hari di Madrasah al-Wathaniyah yang dikelola oleh orang tuanya sendiri dan pada pagi harinya Nurcholish Madjid mengenyam pendidikan di Sekolah Rakyat (SR) di Mojoanyar, Jombang. Kemudian Nurcholish Madjid melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) di kota yang sama. Jadi, sejak di tingkat pendidikan dasar, Nurcholish Madjid telah mengenal dua model pendidikan. Pertama, pendidikan dengan pola madrasah yang sarat dengan penggunaan kitab-kitab kuning sebagai bahan rujukannya. Kedua, Nurcholish Madjid juga memperoleh pendidikan umum secara memadai, sekaligus berkenalan dengan metode pengajaran modern. Pada masa pendidikan dasar inilah, khususnya di Madrasah al-Wathaniyah Nurcholish Madjid sudah menampakkan kecerdasannya dengan berkali-kali menerima penghargaan atas prestasinya.⁸⁷

Dengan basis pengetahuan agama dan kemampuan untuk menguasai kitab kuning pada tahun 1995, Nurcholish Majid akhirnya melanjutkan pendidikan ke Kuliyat al-Mu'allim al-Islamiyyah (KMI) di pondok pesantren Darussalam, pondok Modern Gontor, Ponorogo, Jawa Timur dan lulus pada tahun 1960. Menurut kebiasaan yang normal jenjang pendidikan yang harus dilalui oleh santri adalah selama tujuh tahun. Namun karena otaknya yang cemerlang dan cerdas

⁸⁷Siti Nadroh, *Op, Cit.*, h. 22.

Nurcholish Madjid berhasil menjadi salah satu santri terbaik dengan meraih juara kelas sehingga dari satu iya bisa meloncat ke kelas tiga, dan mampu merampungkan pendidikannya di Gontor kurang lebih lima tahun. Menurut pengakuan Nurcholis Madjid, di pesantren inilah beliau mendapatkan pengalaman pendidikan keagamaan yang sangat menentukan dan memberikan warna terhadap perkembangan pemikiran keagamaanya.⁸⁸

Melihat kecerdasan dan otaknya yang cemerlang rupanya tidak disia-siakan oleh pimpinan pesantren Gontor, K.H Zarkasyi, ini dibuktikan oleh keinginan K.H Zarkasyi untuk mengirimkan Nurcholish Madjid ke Universitas al-Azhar, Kairo, Setelah menamatkan studinya di Gontor. Tetapi karena di Mesir pada saat itu tengah terjadi krisis terusan Suez yang cukup kontroversial, keberangkatan Nurcholish Madjid tertunda. Maka sambil menunggu keberangkatannya ke Mesir, beliau memanfaatkannya dengan mengajar di Gontor selama satu tahun. Namun waktu yang ditunggu-tunggu untuk berangkat ke Mesir tidak kunjung tiba.

Akhirnya terdengar berita bahwa kala itu Mesir sulit meperoleh visa, sehingga tidak memungkinkan Nurcolish Madjid melanjutkan studi ke al-Azhar, Kairo. Tetapi K.H Zarkasyi bisa menghibur dan tidak kehilangan akal. Lalu ia mengirimkan surat ke IAIN Jakarta dan meminta agar murid kesayangannya itu bisa diterima di Lembaga Tinggi Islam yang bergengsi itu. Berkat bantuan salah satu alumni Gontor yang berada di IAIN Syarif Hidayatullah, kemudian

⁸⁸ Ahmad A. Sofyan dan M. Roychan Madjid, *Op.Cit.*, h. 72.

Nurcholish Madjid diterima sebagai mahasiswa tanpa menggondong ijazah Negeri.⁸⁹

Di IAIN Syarif Hidayatullah beliau memilih jurusan yang sangat relevan dengan latar belakang pendidikan yang telah diterimanya. Ia mengambil Fakultas Adab jurusan Sastra Arab dan Sejarah Pemikiran Islam. Nurcholish Madjid berhasil menyelesaikan program sarjana lengkapnya pada tahun 1968, dengan menulis skripsi: *Al-Qur'an Lughatan Wa'Alamiyyan Ma'nan*, yang maksudnya adalah "*Al-Qur'an dilihat secara bahasa bersifat lokal dan dilihat secara istilah bersifat global*"(ditulis dengan menggunakan bahasa Arab).⁹⁰

Pada saat menjadi mahasiswa itu pulalah Nurcholish Madjid berkenalan dengan organisasi yang dari sana nanti ia mengguncang pemikiran Islam di tanah air dan disitu pula gebrakan pemikiran Islam di langit intelektual Indonesia dimulai. Sesuai dengan pribadinya yang suka bereksplorasi, Nurcholish Madjid berjodoh dengan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), organisasi yang dibesarkan sekaligus membesarkannya. Di HMI beliau sangat aktif sehingga setiap jenjang organisasi dilalui dengan penuh semangat, mulai dari komisariat lalu menjadi ketua umum HMI cabang Jakarta hingga akhirnya berhasil menjadi ketua umum PB HMI.

Pada saat menjabat sebagai ketua umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam, Nurcholish Madjid telah menyusun sebuah buku materi perkaderan tentang keislaman yang berjudul Nilai-nilai Dasar Perjuangan (NDP)

⁸⁹Dedy Djamaluddin Malik dan Idi Subandy Ibrahim, *Zaman Baru Islam Indonesia: Pemikiran dan Aksi Politik Abdurrahman Wahid, M. Amin Rais, Nurcholish Madjid, Jalaluddin Rakhmat* (Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998), h. 123-124.

⁹⁰Siti Nadroh. *Op. Cit.*, h. 24.

yang kemudian diubah menjadi Nilai Identitas Kader (NIK), buku ini menjadi bacaan wajib yang menjadi dasar dan motivasi perjuangan anggota Himpunan Mahasiswa Islam.⁹¹

Selesai menjabat ketua umum PB HMI yang kedua pada tahun 1971, ia lebih banyak menulis untuk mengaktualisasikan pemikiran-pemikiran Islam di HMI. Setelah tamat dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Nurcholish Madjid bekerja sebagai dosen di almamaternya, mulai dari 1985, ia ditugaskan memberikan kuliah tentang filsafat di Fakultas Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Bersamaan dengan itu, ia pernah juga berkesempatan menjadi dosen tamu pada Universitas McGill, Montreal, Canada, pada tahun 1990 didampingi oleh istrinya yang mengikuti program Eisenhower Fellowship.⁹²

Sejak Maret 1978 ia memperoleh beasiswa dari *Ford Foundation* untuk melanjutkan ke Universitas Chicago, dan dari sanalah ia memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Kalam dan Filsafat dengan predikat *Summa Cumlaude* pada tahun 1984, dengan disertasinya yang berjudul *Ibnu Taymiyah On Kalam and Falsafah: A Problem Of Reason and Revelation In Islam (Ibnu Taymiyah tentang Kalam Dan Filsafat : Suatu Persoalan Antara Akal Dan Wahyu dalam Islam)*. Selama di Universitas Chicago, pada tahun 1978-1984, secara leluasa Nurcholish Madjid bisa berjumpa dengan perpustakaan Islam Klasik dan Islam abad pertengahan yang begitu luas dan kaya langsung dibawah montor ilmuan neo-modernis asal Pakistan, Fazlur Rahman. Akibatnya pemikiran neo-modernis mulai diserap Nurcholish Madjid dan pengertian baru pemikiran dan praktek neo-

⁹¹Abuddin Nata, *Op, Cit.*, h. 324.

⁹²*Ibid.*, h. 323.

modernis ini pun nampaknya terus terakumulasi selama ia menempuh pendidikan S3-nya itu.

Dilatarbelakangi aktivitasnya yang sangat intens di HMI, tidak heran kalau pada tahun 1967-1999, Nurcholish Madjid terpilih sebagai PEMIAT (Persatuan Mahasiswa Islam Asia Tenggara). Saat beliau menjabat presiden PEMIAT, Malaysia berhasil ditarik sebagai salah satu anggota organisasi Islam regional tersebut, dan ketika itu pula lah beliau pertama kalinya berkesempatan pergi keluar negeri, yaitu ke Malaysia.

Pada Oktober tahun 1998, Nurcholish Madjid berangkat ke Amerika untuk memenuhi undangan State Departemen, dalam rangka mengikuti “Profesional Muda dan Tokoh Masyarakat”. Karena Nurcholis Madjid pada dekade ini masih sangat mencurigai dan anti terhadap pemikiran Barat, maka menurut salah seorang pejabat kedutaan Besar Amerika Serikat, ia diundang sekedar memperlihatkan apa yang ia benci selama ini. Kunjungan Nurcholish Madjid atas undangan pemerintah Amerika Serikat berlangsung selama lima pekan. Selepas itu, Nurcholish Madjid tidak langsung kembali ke Tanah Air. Melainkan singgah dan melanjutkan perjalanan ke Timur Tengah. Seperti diakuinya sendiri, semula semula Nurcholish Madjid kurang bersemangat diundang ke Amrika Serikat dan lebih ingin ke Timur Tengah. Tetapi akhirnya Nurcholish Madjid ke Timur Tengah selepas dari Amerika Serikat dengan sisa bekal yang ada.⁹³

Sepulang dari Amerika Serikat dan Timur Tengah, Nurcholish Madjid segera bergegas untuk melanjutkan perjalanan ke Timur Tengah babak kedua.

⁹³Anas Urbaningrum, *Islam-Demokrasi Pemikiran Nurcholish Madjid* (Jakarta: Republika, 2004), h. 37-38.

Bedanya pada gelombang yang kedua, Nurcholish Madjid beserta rombongan 10 anggota PB HMI untuk berhaji, atas undangan Menteri Pendidikan Kerajaan Arab Saudi, Syaikh Hassan bin Abdullah Ali Syaikh, sebagai hadiah atas ketertarikan sang menteri terhadap gerakan kemahasiswaan di Indonesia, seperti dipaparkan Nurcholish Madjid pada kunjungan pertamanya. Bersama rombongan haji PB HMI ini, Nurcholish Madjid meneruskan ke Riyadh, Madinah, Mekkah kemudian ke Khartoum untuk berdialog dengan Hassan Turabi dari Umin University. Rombongan ini kemudian melanjutkan perjalanan ke Irak, Mesir, Libanon dan ke Pakistan.⁹⁴

Selain itu, Nurcholish Madjid juga sempat meniti karir di dunia pers sebagai pemimpin umum majalah *member* sekaligus pemimpin redaksi majalah *forum* pada tahun 1971-1974, sambil tetap *member* kuliah di IAIN Ciputat. Bersama-sama temannya di Jakarta, ia memberikan dan memimpin LSIK (Lembaga Study Ilmu-ilmu Kemasyarakatan) pada tahun 1984-1987. Ia juga bekerja sebagai peneliti pada LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) sejak tahun 1978. Sejak tahun 1986, bersama beberapa tokoh pemikiran lain, ia mendirikan dan langsung memimpin Yayasan Wakaf Paramadina⁹⁵ yang menurut pemaparannya merupakan lembaga tempat beliau dan teman-teman dengan bebas dan leluasa mengembangkan wawasan dan fikiran, karena sesuai dengan tujuan awal pendiriannya adalah sebagai gerakan intelektual Islam di Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang berperadaban.

⁹⁴*Ibid.*, h. 39-40.

⁹⁵Paramadina adalah nama yang diambil dari bahasa Sansekerta (*prama*) yang berarti utama atau unggul. Sedangkan (*dina*) diadopsi dari bahasa arab *din* yang berarti agama. Jadi paramadina agama pertama dan utama.

Pada tahun ini juga, Nurcholish Madjid menjadi salah seorang peserta *SSRC (Social Science Research Council)* di New York, Amerika Serikat, sampai pada tahun 1988. Selanjutnya pada tahun 1990 ia bersama istrinya menjadi peserta *Eisenhower Fellowship* di Philadelphia, Amerika Serikat, yang kemudian pada tahun 1991-1997 telah menjadi anggota dewan pers. Satu tahun setelah itu, yakni pada tahun 1992-1995, Nurcholish Madjid tercatat sebagai salah seorang anggota, *Steering Committee, The Aga Khan Award For Architecture*. Kemudian pada tahun 1993 ia menjadi anggota KOMNAS HAM (Komite Nasional Hak Asasi Manusia), yang akhirnya juga sebagai anggota Dewan Riset Nasional pada tahun 1994, pada tahun 1995, Nurcholish Madjid menerima “Hadiah Budaya” dari ICMI Pusat dan sebagai MPR RI.⁹⁶

B. Perjuangan dan Karya-karya Nurcholish Madjid

Nurcholish Madjid merupakan lokomotif pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia yang pemikirannya tidak jarang menjadi acuan bagi kalangan pembaharuan modernis muslim di negeri ini. Pikiran-pikirannya pun kadang-kadang sangat kontroversial, sehingga pada tahun 1970-an disebut sebagai tokoh kontroversi. Di sisi lain ada pula yang menyebutnya Natsir muda, sebuah sebutan yang dihubungkan dengan nama salah seorang tokoh partai Masyumi yang berpandangan modern yaitu Muhammad Natsir.

Sebagaimana telah disinggung di bagian depan, Nurcholish Madjid bersama sejumlah tokoh, mendirikan Yayasan Paramadina. Sejauh ini, dapat dikatakan bahwa Nurcholish Majid adalah simbol personal dan maskot dari

⁹⁶Komaruddin Hidayat dalam Kata Pengantar, Nurcholish Madjid, *Islam Agama Peradaban Membangun Makna Relevansi Islam Dalam Sejarah*, Op. Cit., h. vi.

lembaga ini. Paramadina sebagai salah satu pusat kajian keislaman, menawarkan citra baru Islam inklusif dan menghadirkan perspektif baru dalam menelaah problem kemanusiaan kontemporer.

Dengan *platform* dan visi Paramadina semacam itu, Nurcholish Madjid mengembangkan secara konsisten jalur intelektualnya. Karya-karya intelektualnya kini identik dengan produktivitas lembaganya. Dengan model semacam ini Paramadina bukan saja muncul sebagai semacam aliran tersendiri dalam mengkaji agenda keislaman dan kebangsaan, melainkan juga mempunyai wibawa keilmuan tinggi.⁹⁷ Sebagai lembaga pemikiran, Paramadina telah melembaga. Tetapi sebagai sebuah merek atau mazhab pemikiran, Paramadina hampir-hampir mencerminkan pribadi Nurcholish Madjid sendiri.

Pada tanggal 3 Januari 1970 Nurcholish Madjid diundang mengisi acara pertemuan silaturahmi antara para aktivis dari empat organisasi Islam yaitu Persami, HMI, GPI dan PPI yang diselenggarakan oleh PPI Cabang Jakarta. Dalam acara ini sebenarnya yang diminta untuk memberi ceramah adalah Dr. Alfian, tetapi karena ia sakit, maka Nurcholish Madjid diminta sebagai pembicara pengganti. Untuk acara silaturahmi ini Nurcholish Madjid menulis artikel yang berjudul “keharusan Pembaruan Pemikiran Islam dan Masalah Integrasi Umat” yang kemudian menimbulkan perdebatan besar mengenai sekulerisasi dan sekulerisme. Ahmad Wahid dalam catatan hariannya, *pergolakan pemikiran Islam* menganggap Nurcholish Madjid telah berubah dari seseorang pemikir Islam yang *konservatif* kepada pemikiran *liberal*.

⁹⁷Pada sebuah kesempatan, Eki Sjachruddin menyebut bahwa kelas dan wibawa intelektual Nurcholish Madjid setara dengan Soejatmoko. Lihat Anas Urbaningrum, *Op. Cit.*, h. 67.

Menurut Budhy Munawar Rahman Nurcholish Madjid tidaklah mengalami suatu perubahan, tetapi artikel tersebut benar-benar merupakan kelanjutan dari pemikiran sebelumnya, sebab artikel ini menggambarkan persoalan-persoalan mendesak untuk dipecahkan, Khususnya menyangkut integrasi umat akibat terpecah belahnya oleh paham-paham partai politik. Nurcholish Majid dengan “*sekulerisasi dan Islam Yes, Partai Islam, No*” hendak mengajak umat Islam untuk mulai melihat kemerdekaan-kemerdekaan berfikir dan kreatifitas yang telah terpasang, karena itu ia menyarankan suatu kebebasan berfikir, sikap terbuka dan kelompok pembaruan yang liberal dan bisa menumbuhkan suatu istilah sendiri “*daya pukul psikologi*” yang dapat memunculkan pikiran-pikiran segar.

Respon artikel-artikel Nurcholish Madjid yang terbit tahun 1970-1972 sangat keras dan memicu kontroversi berkepanjangan. Tetapi respon inilah yang membuat Nurcholish Madjid terkenal diseluruh Indonesia dengan pro-kontranya. Budhy Munawar Rahman berpandangan bahwa, sebenarnya Nurcholish Majid hanya melakukan kesalahan taktis sebagaimana yang terjadi pada tanggal 3 Januari 1970. Menurut Nurcholish Madjid, jika ia bisa kembali ke zaman itu, ia pasti akan menggunakan pendekatan-pendekatan yang pernah dilakukan sebelumnya, yaitu penetrasi secara perlahan-lahan atau metode penyelundupan didalam memperkenalkan gagasan-gagasan baru.⁹⁸

Sebagai seorang tokoh pembaruan, Nurcholish Madjid selalu mengekspresikan pemikirannya dibidang keislaman, politik Islam, moral dan kemasyarakatan dalam berbagai media antara lain *Kompas*, *Panji Masyarakat*,

⁹⁸Ditulis oleh Budhy Munawar Rachman dalam kata pengantar, Budhy Munawar Rachman dan Eliza Peldi Taher, *Satu Menit Pencerahan Nurcholish Madjid “Buku Pertama: A-C”* (Bandung: Paramadina, 2013), h. xix-xxiv.

Pelita, Suara Pembaharuan, Republika, Majalah Ulumul Qur'an, Prisma dan Amanah. Tulisannya juga selalu menghiasi lembaran majalah politik, misalnya *Adil, Forum, Gatra, Matra, Tempo* dan lain-lain.

Nurcholish Madjid adalah seorang penulis yang sangat produktif. Prestasi menulis itu bukanlah diraihinya secara spontan dan dalam waktu yang singkat, itu semua diraih setelah melalui pergolakan pemikiran dan masa perjuangan yang sangat melelahkan. Kontemplasi (renungan-renungan) yang ditempuhnya selalu dipengaruhi oleh pemikiran Fazlur Rahman. Dengan kata lain Fazlur Rahman bisa disebut sebagai guru utama yang penting dalam pematangan intelektualnya.

Proses pematangan tulisan-tulisannya, juga dilatarbelakangi oleh pembenturan pribadinya dengan persepsi terhadap kenyataan sosial politik yang dihadapinya. Hal ini dapat dilihat dari fenomena ia tidak akan menyaksikan ketegangan relasi antara Islam dan Negara, disatu sisi dan sisi lain. Harapan akan bentuk relasi ideal antara dua kekuatan yang dalam keyakinannya akan bisa mengisi masa transisi proses pembentukan formal politik pembangunan yang direkayasa oleh pemerintahan orde baru.

Itulah sebabnya, renungan Nurcholish Madjid muda, seperti tampak pada tulisannya yang dimuat pada *Pos Bangsa, Tribun dan Mimbar* disekitar tahun 1970-1980 merupakan contoh dari perenungan pemikiran dalam merespon teori pertumbuhan yang diperdebatkan di awal masa pembangunan politik ekonomi Orde Baru. Tulisannya juga pada waktu itu dibicarakan bagaimana komitmen

seorang intelektual muda Islam yang hadir dalam kapasitasnya sebagai pembela kaum lemah, sebelum ia menjadi teolog dan filosof Islam saat ini.⁹⁹

Beberapa karya-karya Nurcholish Madjid yang dapat dipaparkan antara lain:

1. *Islam Kemoderenan dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan, 1987.
2. *Khazanah Intelektual Islam*. Jakarta: Bulan-Bintang, 1968.
3. *Islam Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Paramadina, 2008.
4. *Islam Kerakyatan dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan, 1993.
5. *Pintu-Pintu Tuhan*. Jakarta: Paramadina, 1994.
6. *Islam Agama Kemanusiaan, Membangun Tradisi dan visi Baru Islam Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 1995.
7. *Islam Agama Peradaban, Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta: Paramadina, 1995.
8. *Tradisi Islam: Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 1997.
9. *Masyarakat Religius*, Jakarta: Paramadian, 1997.
10. *30 Sajian Rohani: Renungan di Bulan Ramadhan*. Bandung: Mizan, 1998.
11. *Perjalanan Religius Umrah dan Haji*, Jakarta: Paramadina, 1997.
12. *Bilik-Bilik Pesantren*, Jakarta: Paramadina, 1997.
13. *Cita-Cita Politik Islam*, Jakarta: Paramadina, 1999.
14. *Cendekiawan Relegiusitas Masyarakat*, Jakarta: Tekad dan Paramadina, 1999.

⁹⁹Deddy Djameluddin dan Idy Subandy Ibrahim, *Op, Cit.*, h. 113.

15. *Peran-Peran Taqwa: Kumpulan Khutbah Jum'at di Paramadina*, Jakarta: Paramadina, 2000.
16. *Perjalanan Religius Umrah dan Haji*, Jakarta: Paramadina, 2000.
17. *Fatseon Nurcholish Madjid*, Jakarta: Penerbit Republika, 2002.
18. *Atas Nama Pengalaman: Beragama dan Berbangsa di Masa Transisi, Kumpulan Dialog Jum'at di Paramadina*, Jakarta: Paramadina, 2002.
19. *The True Face of Islam: Essays on Islam and Modernity in Indonesia*, Jakarta: Voice Center Indonesia, 2003.
20. *Indonesia Kita*, Jakarta: Gramedia, 2004.

Karya-karya Nurcholish Madjid ini terutama berisi pemikiran Islam dan kontek integrasi keislaman-keindonesiaan-kemoderanan. Adapun karya beliau yang erat kaitannya dengan judul ini adalah *Islam Agama Peradaban Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah, Islam Kemoderenan dan Keindonesiaan, Islam Doktrin dan Peradaban*, dan *Cita-Cita Politik Islam*.

C. Pemikiran Nurcholish Madjid tentang Relasi Islam dan Negara di Indonesia

Relasi Islam dan negara, khususnya negara Islam di Indonesia, menurut Nurcholish Madjid tidak dikenal dalam sejarah. Buktinya Nabi, baru dimakamkan tiga hari setelah wafatnya, akibat keributan umat soal suksesi. Pola suksesi tidak jelas, sehingga terjadilah permasalahan yang sulit diselesaikan. Oleh karena itu, masalah kenegaraan bukanlah suatu kewajiban, bahkan tidak menjadi integral dalam Islam. Mengenai munculnya gagasan negara Islam atau Islam sebagai

negara, tidak lain merupakan kecenderungan apologetic.¹⁰⁰Setidaknya, menurut Nurcholish Madjid apologetic tersebut dapat ditinjau dari dua segi. Pertama, kemunculannya adalah apologi terhadap ideologi-ideologi Barat seperti demokrasi, sosialisme, komunisme dan lain sebagainya. Invasi cultural berupa ideologi-ideologi tersebut direspon dalam apresiasi yang bersifat ideologi politis, yang melahirkan pandangan dan berujung pada perjuangan Islam politik yang mencita-citakan terbentuknya negara Islam, sebagaimana terdapat negara demokrasi, negara sosialis, negara komunis, dan lain sebagainya.¹⁰¹

Kedua, pandangan legalisme sebagai lanjutan fiqihisme yang begitu dominan di kalangan umat Islam, yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan sistem hukum yang mengatur pemerintahan dan negara pada masa lalu. Pemahaman yang demikian masih kuat mengiringi wacana politik Islam modern, yang mengasumsikan bahwa untuk menegakkan sebuah syari'at maka haruslah dimulai dari negara sebagai elemen kekuasaan yang akan mampu mengatur dan menegakkannya. Menurut Nurcholish Madjid, fiqh itu telah kehilangan relevansinya dengan pola kehidupan zaman sekarang. Sedangkan perombakan secara total, sehingga sesuai dengan pola kehidupan modern dari segala aspeknya sudah tidak lagi menjadi kompetensi dan kepentingan umat Islam saja, melainkan juga orang-orang lain. Dengan demikian, dalam pandangan Nurcholish Madjid, hasilnya tidak perlu hanya merupakan hukum Islam, melainkan hukum yang

¹⁰⁰Nurcholis Madjid , “Menyegarkan Paham Keagamaan di Kalangan Umat Islam Indonesia”, dalam *Islam Kemoderenan dan Keindonesiaan* , (Bandung: Mizan,1987), h. 253.

¹⁰¹Cak Nur Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan*, (Jakarta: Paramadina, 1995), h. 3

meliputi semua orang untuk mengatur kehidupan bersama.¹⁰² Dalam konteks ini, nampaknya Cak Nur sangat berobsesi untuk menjelaskan bahwa Islam yang hakiki bukan semata merupakan struktur atau susunan dan kumpulan hukum, yang tegak berdiri di atas formalisme negara dan pemerintahan. Tetapi Islam sebagai pelaksanaan tauhid yang merupakan kekuatan sepirtual yang mampu melahirkan jiwa yang *hanif*, *inklusif*, demokratis serta menghargai pluralisme masyarakat.¹⁰³

Konsep negara Islam adalah suatu distorsi hubungan proporsional antara Islam dan negara. Negara baginya aspek kehidupan duniawi yang dimensinya rasional dan kolektif, sedangkan agama merupakan segi lain yang dimensinya spiritual dan individual. Antara Islam dan negara memang tidak bisa dipisahkan, namun antara keduanya harus tetap dibedakan dalam dimensi dan cara pendekatannya. Dari sinilah Nurcholish Madjid menolak Islam dipandang sebagai ideologi sebab akan merendahkan dan mendiskreditkan Islam sebagai sesuatu yang setara dengan ideologi dunia.¹⁰⁴

Islam tidak perlu menuntut negara atau pemerintah Indonesia menjadi negara atau pemerintah Islam. Baginya adalah substansi atau esensinya, bukan bentuk formalnya yang sangat simbolis. Pembentukan negara adalah suatu kewajiban bagi umat manusia dalam bentuk demokratis, meskipun tidak ada keharusan dalam Islam bentuk negara Islam, karena membentuk negara itu dapat memberikan beberapa prinsip yang dipakai dalam mewujudkan masyarakat

¹⁰²Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, (Cet ke-2, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992), h. 225.

¹⁰³*Ibid.*

¹⁰⁴Nurcholish Madjid, "Cita Politik Kita", dalam Bosco Carillo dan Dasrizal, *Aspirasi Umat Islam Indonesia* (Jakarta: Leppenas, 1983), h. 4.

dimaksud, yaitu: *Pertama*, pemerintahan yang adil dan demokratis (musyawarah). *Kedua*, organisasi pemerintahan yang dinamis. *Ketiga*, kedaulatan.¹⁰⁵

Masalah Integrasi keislaman dan keindonesian semakin konkrit, ketika Nurcholish Madjid menjelaskan hubungan Islam dan ideologi pancasila. Ia berpendapat bahwa kaum muslimin Indonesia menerima Pancasila dan UUD 1945 dengan pertimbangan yang jelas. Kedudukan Pancasila dan UUD 1945 menurutnya, sama kedudukan dan fungsi dokumen politik pertama dalam sejarah Islam, yaitu piagam Madinah, dan umat pada masa Rasulullah menerima konstitusi Madinah dalam rangka menyetujui kesepakatan bersama dalam membangun masyarakat politik bersama.¹⁰⁶

Berdasarkan pemikiran tersebut, tampak Nurcholish Madjid tidak merasa risau ketika pemerintah orde baru memberlakukan UU keormasan (UU No.8/1985) antara lain, menetapkan keharusan pelabelan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi organisasi kemasyarakatan. Ia hanya memfilterisasi kekhawatiran sebagai umat Islam yang melihat pemberlakuan UU tersebut dapat mereduksi peranan agama Islam yang justru pemanfaatan simbolisme formal agama menjadi kurang. Dengan persoalan itu, Nurcholish Madjid memunculkan idenya tahun 1970-an yang cukup populer, yaitu “Islam yes, partai Islam No” Organisasi semacam Muhammadiyah, al-Irsyad, dan Persis, dinilainya sudah berhenti sebagai pembaru-pembaru.

¹⁰⁵Nurcholis Madjid, “Suatu Tahapan Terhadap Masa Depan Politik Indonesia”, dalam *Prisma*, edisi ekstra, Jakarta, 1984, h. 31.

¹⁰⁶Marwan Saridjo, *Cak Nur di Antara Sarung dan Dasi dan Musdah Mulia Tetap Berjilbab*, (Jakarta: Penamadani, 2005), h. 16.

Mereka telah menjadi beku sendiri, karena mereka tidak sanggup menangkap semangat dari ide-ide pembaruan sendiri, yaitu dinamika dan progresivitas. Akibatnya ialah, timbul keadaan *stagnant* yang menyeluruh, menimpa umat hingga sekarang ini. Dalam konteks inilah Cak Nur melihat pentingnya kehadiran gerakan pembaruan Islam. Menurut Cak Nur pembaruan harus dimulai dengan dua tindakan yang saling erat kaitannya, yaitu melepaskan diri dari nilai-nilai tradisional dan mencari nilai-nilai yang berorientasi ke masa depan. Lantas ia mengajukan ide-ide seperti sekularisasi, liberalisasi, rasionalisasi dan modernisasi. konsep-konsep yang digelindingkan tersebut telah menimbulkan kontroversi sehingga sempat memancing kehebohan dikalangan internal umat.¹⁰⁷

Meski banyak yang tidak sepakat, namun Nurcholish Madjid tetap konsisten mempertahankan berbagai gagasan pembaruannya. Untuk itu, acapkali Nurcholish Madjid harus menjelaskan konsep-konsep yang dipakainya, dengan tujuan agar umat mengerti dan memahami apa-apa yang dimaksudkannya.¹⁰⁸ Tentang liberalisasi, maksudnya adalah sebagai proses pembebasan ajaran-ajaran dan pandangan Islam dari nilai-nilai tradisional, dan mencari nilai-nilai yang berorientasi ke masa depan. Lebih lanjut dikatakan, bahwa proses liberlaisasi berhubungan dengan sekularisasi. Maksud sekularisasi menurut Nurcholish Madjid adalah usaha untuk menduniawikan nilai-nilai yang sudah semestinya bersifat duniawi, dan melepaskan umat Islam dari kecenderungan untuk *mengukhwrawi* kannya.¹⁰⁹

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ Cak Nur Madjid, *Islam Kemoderanan dan Keindonesiaan*, h. 209.

¹⁰⁹ *Ibid.*

Uraian di atas memperlihatkan, bahwa pemikiran Nurcholish Madjid tentang hubungan Islam dan negara termasuk pemikiran Islam substantif. Untuk lebih jelasnya pemikiran politik Islam substantif dari Nurcholish Madjid ini, nampaknya perlu dilakukan sesuatu perbandingan dalam kasus perkasus pemikiran dengan kaum formalis. Di sini diambil contoh tentang agama kemanusiaan, desakralisasi Pancasila, dan budaya Islam pesisir. Semuanya merupakan pandangan yang relatif luput dari perhatian kaum formalis. Sehingga, pemikiran Nurcholish Madjid ini betul-betul menjadi alternative pemikiran Islam, termasuk pemikiran politik Islam.

Apa yang tersirat bagi kaum formalis adalah ayat-ayat keras yang menyatakan bahwa manusialah yang harus melayani Tuhan. Dengan demikian, hidup adalah untuk Tuhan. Padahal, bagi Nurcholish Madjid Islam (agama) itu untuk manusia, yang implikasinya adalah bahwa Islam itu untuk kebaikan semua manusia atau *rahmatan lil al-amin* (rahmat bagi alam raya). Islam sebagai agama kemanusiaan itu, bagi Cak Nur merupakan salah satu pokok (substansi) dari Islam itu sendiri. Pemikiran ini dialamatkan ke dalam konteks keindonesiaan yang plural, di mana Islam harus menempatkan diri sebagai suatu rahmat, seperti dalam pernyataan berikut: “Karena, cita-cita keislaman yang *fithri* itu sejalan dengan cita-cita kemanusiaan pada umumnya, maka tentunya cita-cita keislaman di Indonesia juga sejalan dengan cita-cita manusia Indonesia pada umumnya.

Pernyataan ini memang mengimplikasikan adanya kepercayaan tentang kebaikan alami manusia, dengan sendirinya termasuk manusia Indonesia. Pandangan ini merupakan salah satu ajaran pokok agama Islam. Berdasarkan hal

itu maka sudah jelas bahwa sistem politik yang sebaiknya diterapkan di Indonesia ini ialah sistem yang tidak hanya baik untuk umat Islam, tetapi yang sekiranya juga akan membawa kebaikan untuk semua anggota masyarakat Indonesia.¹¹⁰

Pemikiran politik Islam Nurcholish Madjid tidak lepas dari posisi yang dipilihnya, yaitu Keislaman, Keindonesiaan, dan Kemoderenan. Maka dalam masalah Islam dan negara pun kerap dilatarbelakangi oleh tiga dimensi tersebut. Berikut adalah pemikirannya tentang Islam dan negara yang secara praktis berada di wilayah pemikiran domestik Indonesia. Pertama-tama Nurcholish Madjid mengakui bahwa dalam dimensi sejarah Politik Islam di Indonesia, Islam telah menampilkan wujudnya yang eksklusif dan berkesan galak, sehingga banyak kalangan non Muslim yang meragukan Islam sebagai sebuah sistem politik yang terbuka, misalnya, Walter Bonar Sidjabat melihat bahwa politik Islam sebagai sebuah cita-cita eksklusifistik yang hanya bertujuan untuk mendirikan negara Islam.¹¹¹

Inilah yang kemudian dijawab oleh Nurcholish Madjid. Menurutnya, perdebatan ideologi politik antara negara Islam versus negara nasional atau negara Pancasila yang memberi kesan Islam yang eksklusif itu, sebetulnya, adalah peristiwa kesejarahan insidental, bukan pandangan keagamaan yang esensial, dan hanya merupakan akibat-akibat dari bentuk-bentuk tertentu tahap pertumbuhan

¹¹⁰Cak Nur Madjid, *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi*, (Jakarta: Paramadina, 1999), h. 52.

¹¹¹Fachry Ali, *Tharekat Nurcholish: Jejak Pemikiran dari Pembaru sampai Guru Bangsa*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 27.

proses dan struktur kenegaraan yang masih dalam jenjang formatifnya yang sangat dini.¹¹²

Nurcholish Madjid menyikapi bahwa retorika negara Islam dalam sidang-sidang konstituante itupun harus dipandang dari dimensi kesejarahan. Maka, ketika umat Islam pada waktu itu masih diliputi cita-cita negara Islam, seperti yang telah diperlihatkan beberapa partai politik Islam, harus dipandang cocok dan benar menurut ukuran keadaan dan kondisi pada waktu itu, yang masih dalam taraf pencarian jati diri bagi pembentukan negara dan bangsa yang baru mencapai kemerdekaannya. Nurcholish Madjid menegaskan bahwa sekalipun dalam Islam tidak ada doktrin “pemisahan” antara Islam dan negara, tidak berarti bahwa Islam mengidentikkan kekuatan politik sebagai agama atau sebaliknya, agama dijadikan alat sebagai upaya untuk mencapai kekuasaan politik. Kekuasaan politik bukan tujuan hidup manusia, tetapi hanya sebagai alat untuk mempermudah mencapai tujuan hidup yang lebih hakiki. Karena “Nabi Muhammad saw pun setelah berhasil membebaskan Mekkah dari kaum musyrikin Quraisy, diperintah Tuhan untuk bertasbih kepada-Nya dan memohon ampun kepada-Nya” demikian kata Cak Nur.¹¹³

Oleh karena itu menurut Nurcholish Madjid, dari sudut pandang Islam, pernyataan bahwa Indonesia bukan negara sekuler (bukan negara yang menganut sekulerisme yang memisahkan agama dan negara) dan bukan pula negara teokrasi (negara yang kekuasaan politiknya dipegang oleh pendeta atau kaum rohaniawan), dapat dibenarkan, karena memang sejalan dengan ajaran Islam itu sendiri.

¹¹²*Ibid*, h. 32.

¹¹³Nurcholish Madjid, *Op.Cit*, h. 75.

Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila. Bagi Cak Nur, pernyataan seperti itu adalah cara yang tepat bagi masyarakat muslim Indonesia, secara ideologis, dalam memandang negerinya sendiri. Ungkapan itu mengandung juga adanya kesepakatan dan kompromi yang sangat rumit diantara pendiri bangsa, yaitu kompromi antara nasionalis muslim dengan nasionalis sekuler mengenai ideologi negara yang resmi.¹¹⁴

Untuk itu, menurut Nurcholish Madjid, Pancasila merupakan jalan tengah bagi penyelesaian masalah perdebatan ideologis tersebut. Penerimaan Pancasila sebagai landasan negara menunjukkan juga sikap arif pemimpin Islam pada waktu itu dalam menjaga integrasi negara. Malah jika diteliti lebih jauh, demikian Cak Nur. Segala yang terkandung di dalam negara itu sejalan dengan ajaran Islam, meskipun simbol-simbol Islam telah dihilangkan, atau tepatnya dinetralkan.¹¹⁵

Sebagai salah satu contoh adalah ungkapan pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” pada hakikatnya mengandung tekanan yang sangat khusus menyangkut kualitas monoteistik prinsip keesaan Tuhan, *tauhid*. Pancasila dan UUD 1945, sebagai wujud lain Piagam Jakarta yang telah ditempatkan senetral mungkin, akhirnya menjadi basis politik bangsa Indonesia dalam menghadapi heterogenitas budaya, suku, bahasa dan agama di Indonesia. Ini berarti, Pancasila juga menjadi muara bagi seluruh agama-agama yang ada di Indonesia, atau yang sering diistilahkan Cak Nur dengan mengambil istilah al-Qur’an sebagai *kalimah sawa*, titik pertemuan agama-agama. Umat Islam Indonesia dapat menerima Pancasila itu setidaknya ditentukan oleh dua pertimbangan. Pertama, nilai-

¹¹⁴Nurcholish Madjid dkk, *Islam Universal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 203.

¹¹⁵*Ibid.*

nilainya dibenarkan atau sejalan dengan ajaran Islam; dan kedua, ia berfungsi sebagai titik kesepakatan antara berbagai golongan untuk mewujudkan kehidupan sosial politik bersama.¹¹⁶

Kedudukan serta fungsi Pancasila dan UUD 1945 itu bagi umat Islam Indonesia dapat dipandang sama dengan kedudukan dan fungsi dokumen politik pertama dalam sejarah Islam yang dikenal dengan nama Piagam Madinah pada masa awal kehidupan Islam di bawah pimpinan Muhammad saw di Madinah. Bagi umat Islam Indonesia sendiri, jika substansi lebih dikedepankan dari pada simbol, maka dengan tanpa disadari etika Islam akan berubah menjadi etika bangsa. Dengan demikian, tanpa disadari juga negara Islam yang dicita-citakan oleh para pendahulu politikus Muslim itu bisa terwujud meskipun tidak secara yuridis formal.

Karena Pancasila sebagai salah satu instrumen penting dari “Islam Peradaban”, maka Pancasila adalah sebuah ideologi yang berwatak dinamis, tidak statis, karena itu bersifat terbuka. Sifat dan watak inilah yang diharapkan oleh para pendiri bangsa, yang tentunya faham kearifan para politikus Islam sangat berperan, sebagai landasan filosofis bersama, *common philosophical ground*, sebuah masyarakat plural yang modern.

¹¹⁶*Ibid.*

BAB IV

ANALISA DATA

A. Relasi Islam dan Negara di Indonesia Menurut Pemikiran Politik Nurcholish Madjid

Dari beberapa literatur, terdapat tiga paradigma yang cukup populer dalam wacana relasi Islam dan negara, meski dengan istilah yang beragam. Pertama, perspektif integralsistik. Paradigma integralistik merupakan paham dan konsep hubungan Islam dan negara yang menganggap keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan dua lembaga yang menyatu. Ini juga memberikan pengertian bahwa negara merupakan suatu lembaga politik dan sekaligus lembaga agama. Paradigma ini melahirkan konsep tentang agama negara, yang berarti bahwa kehidupan kenegaraan diatur dengan menggunakan hukum dan prinsip keagamaan. Dari sinilah kemudian paradigma integralsistik dikenal dengan paham Islam *din wa dawlah*, dengan hukum Islam sebagai sumber landasan mengatur negara. Oleh karena itu, dalam bernegara umat Islam hendaknya kembali pada sistem ketatanegaraan Islam, dan tidak perlu sistem ketatanegaraan Barat. Sistem ketatanegaraan atau politik Islam yang harus diteladani adalah sistem yang telah dilaksanakan Nabi Muhammad saw dan oleh empat khilafah.

Kedua, perspektif sekuleristik. Paham sekuler memisahkan dan membedakan antara Islam dan negara secara diametral (terpisah). Dalam negara sekuler sistem dan norma hukum positif dipisahkan dengan nilai dan norma agama. Norma hukum ditentukan atas kesepakatan manusia dan tidak berdasarkan

agama atau firman-firman Tuhan, meskipun mungkin norma-norma tersebut bertentangan dengan norma-norma agama. Sekalipun ini memisahkan antara agama dan negara, akan tetapi pada lazimnya negara sekuler membebaskan warga negaranya untuk memeluk agama apa saja yang mereka yakini dan negara tidak intervensi dalam urusan agama. Argumentasi pendukung paradigma ini adalah tidak ada ayat yang secara tegas mewajibkan pembentukan pemerintahan dan negara, sekaligus menekankan bahwa pembentukan pemerintahan tidaklah masuk dalam tugas yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad saw. Beliau hanya rasul yang membawa risalah agama saja, tidak termasuk perintah membentuk negara.

Ketiga, perspektif simbiotik. Konsep ini menolak pendapat bahwa Islam adalah suatu agama yang memiliki sistem ketatanegaraan. Namun menolak juga pengertian Barat bahwa Islam hanya mengatur hubungan manusia dengan Maha Pencipta. Pendukung konsep ini berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Menurut konsep ini, hubungan Islam dan negara dipahami saling membutuhkan dan bersifat timbal balik. Negara memerlukan agama (Islam), karena Islam juga membantu negara dalam pembinaan moral, etika dan spiritualitas. Begitu juga sebaliknya, agama juga membutuhkan negara sebagai instrument dalam melestarikan dan mengembangkan agama (Islam).

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa adanya kekuasaan yang mengatur kehidupan manusia merupakan kewajiban agama yang paling besar, karena tanpa kekuasaan negara, maka agama tidak akan bisa berdiri tegak. Pendapat Ibnu

Taimiyah tersebut melegitimasi bahwa antara Islam dan negara merupakan dua entitas yang berbeda, tetapi saling membutuhkan. Oleh karenanya, konstitusi yang berlaku dalam paradigma ini tidak saja berasal dari adanya *social contract*, tetapi bisa saja diwarnai oleh hukum agama (*syari'ah*).

Berdasarkan tiga paradigma ini, Indonesia berada pada paradigma yang ketiga, yaitu simbiotik. Faktanya, Indonesia tidak menjadikan Islam sebagai agama negara dan tidak menjadikan syaria Islam sebagai sumber utama pembuatan hukum. Juga tidak menjadikan Islam sebagai ideologi politik dan sistem pemerintahan. Hubungan antara Islam dan negara di Indonesia mencerminkan upaya untuk terus mencari kompromi atau jalan tengah di antara berbagai kepentingan ideologis. Pancasila akhirnya diterima sebagai jalan kompromi antara kalangan nasionalis-agamis, yang menginginkan Islam sebagai dasar negara, dengan kalangan nasionalis-sekuler. Di situ negara Indonesia dibayangkan sebagai, dalam istilah Mukti Ali yang terkenal “bukanlah negara teokratis, dan juga bukan negara sekuler”. Faktanya di Indonesia, umat Islam masih bebas menjalankan syariat Islam, bahkan masih dibebaskan untuk memilih dan menyatakan sikap sesuai hati nuraninya.

Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 menjadi dasar hukum di Indonesia. Menjadi Justifikasi kuatnya relasi antara Islam dan negara di Indonesia. Berdasarkan hal ini, sudah sepatutnya umat Islam yang menjadi warga negara Indonesia berislam dengan *kaffah*, dan bernegara dengan baik. Mengamalkan setiap aturan dalam Islam (syariat), dan mengikuti setiap peraturan negara selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Dari penjelasan di atas, pemikiran hubungan Islam dan negara yang perlu disadari adalah bahwa Islam tidak pernah menentukan bentuk dan pola tertentu suatu negara yang harus dipraktikkan oleh umat Islam. Bahkan dalam negara Madinah yang dipimpin oleh Nabi saja, tidak terdapat klausul Islam sebagai agama negara dalam piagam Madinahnya. Sejauh tidak bertentangan dengan dengan semangat ajaran Islam, maka bentuk negara dan sistem politik manapun dapat diterima oleh Islam. Namun mendirikan negara merupakan kewajiban umat Islam. Negara merupakan alat bagi umat Islam untuk dapat melaksanakan ajaran-ajaran Islam, sehingga tujuan syara menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan dapat tercapai dalam masyarakat.

B. Analisa Pemikiran Politik Nurcholish Madjid Tentang Relasi Islam dan Negara Di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah

Hubungan Islam dan negara menurut Nurcholish Madjid tidak dikenal dalam sejarah. Buktinya Nabi baru dimakamkan tiga hari setelah wafatnya akibat keributan umat soal suksesi. Pola suksesi tidak jelas, sehingga terjadilah permasalahan yang sulit diselesaikan. Oleh karena itu, masalah kenegaraan bukanlah suatu kewajiban, bahkan tidak menjadi integral dari Islam. Mengenai munculnya gagasan negara Islam atau Islam sebagai negara, tidak lain merupakan kecenderungan apologetis. Menurut Nurcholish Madjid apologetis tersebut dapat ditinjau dari dua segi. *Pertama*, kemunculannya adalah apologi terhadap ideologi-ideologi Barat seperti demokrasi, sosialisme, komunisme dan lain sebagainya. Invasi cultural berupa ideologi tersebut direspon dalam apresiasi yang bersifat ideologi politis, yang melahirkan pandangan yang berujung pada perjuangan

Islam politik yang mencita-citakan terbentuknya negara Islam, sebagaimana terdapat negara demokrasi, negara sosialis, negara komunis dan lain sebagainya.

Kedua, pandangan legalisme sebagai kelanjutan fiqihisme yang begitu dominan di kalangan umat Islam, yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan sistem hukum yang mengatur pemerintahan dan negara pada masa lalu. Pemahaman yang demikian masih kuat mengiringi wacana politik Islam modern, yang mengasumsikan bahwa untuk menegakkan syariat maka haruslah dimulai dari negara sebagai elemen kekuasaan yang akan mampu mengatur dan menegakkannya. Padahal menurut Nurcholish Madjid, fiqh telah kehilangan relevansinya dengan pola kehidupan zaman sekarang. Sedangkan perombakkan secara total, sehingga sesuai dengan pola kehidupan modern dari segala aspeknya sudah tidak lagi menjadi kompetensi dan kepentingan umat Islam saja, melainkan juga orang-orang lain. Dengan demikian, dalam pandangan Nurcholish Madjid, hasilnya tidak perlu hanya merupakan hukum Islam, melainkan hukum yang meliputi semua orang, untuk mengatur kehidupan bersama. Dalam konteks ini, nampaknya Nurcholis Madjid menjelaskan bahwa Islam yang hakiki bukan semata merupakan struktur atau susunan dan kumpulan hukum, yang tegak berdiri di atas formalisme negara dan pemerintahan. Tetapi Islam sebagai pelaksanaan tauhid, yang merupakan kekuatan spiritual yang mampu melahirkan jiwa yang *hanif*, *inklusif*, demokratis serta menghargai pluralisme masyarakat.

Konsep negara Islam adalah suatu distorsi hubungan proporsional antara Islam dan negara. Negara baginya merupakan aspek kehidupan duniawi yang dimensinya rasional dan kolektif. Sedangkan Islam merupakan segi lain yang

dimensinya spiritual dan individual. Antara Islam dan negara memang tidak bisa dipisahkan, namun antar keduanya itu harus tetap dibedakan dalam dimensi dan cara pendekatannya. Dari sinilah Nurcholish Madjid menolak Islam dipandang sebagai ideologi sebab akan merendahkan dan mendiskreditkan Islam sebagai sesuatu yang setara dengan ideologi dunia.

Islam tidak perlu menuntut negara atau pemerintah Indonesia menjadi negara atau pemerintahan Islam. Baginya substansi atau esensinya, bukan bentuk formalnya yang sangat simbolis. Pembentukan negara adalah suatu kewajiban bagi umat manusia dalam bentuk demokratis, meskipun tidak ada keharusan dari Islam dalam bentuk negara Islam, Karena membentuk negara itu dapat memberikan beberapa prinsip yang dipakai dalam mewujudkan masyarakat dimaksud yaitu, *pertama*, pemerintahan yang adil dan demokratis (musyawarah), *keuda*, organisasi pemerintahan yang dinamis, *ketiga*, kedaulatan.

Oleh karena itu menurut Nurcholish Madjid, dari sudut pandang Islam, pernyataan bahwa Indonesia bukan negara sekuler (bukan negara yang menganut sekulerisme yang memisahkan Islam dan negara) dan bukan pula negara teokrasi (negara yang kekuasaan politiknya dipegang oleh pendeta atau kaum rohaniawan), dapat dibenarkan, karena memang sejalan dengan ajaran Islam itu sendiri. Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila. Bagi Nurcholis Madjid, pernyataan seperti itu adalah cara yang tepat bagi masyarakat muslim Indonesia, secara ideologis, dalam memandang negerinya sendiri. Ungkapan itu mengandung juga adanya kesepakatan dan kompromi yang sangat rumit di antara pendiri

bangsa, yaitu kompromi antara nasionalis muslim dengan nasionalis sekuler mengenai ideologi negara yang resmi.

Untuk itu menurut Nurcholish Madjid, Pancasila merupakan jalan tengah bagi penyelesaian masalah perdebatan ideologis tersebut. Penerimaan Pancasila sebagai landasan negara menunjukkan juga sikap arif pemimpin Islam pada waktu itu dalam menjaga integrasi negara. Malah, jika diteliti lebih jauh, demikian, Nurcholis Madjid, segala yang terkandung di dalam negara itu sejalan dengan ajaran Islam, meskipun simbol-simbol Islam telah dihilangkan, atau tepatnya dinetralkan.

Menurut pemikirannya bahwa sekalipun dalam Islam tidak ada doktrin pemisahan antara Islam dan negara, tidak berarti bahwa Islam mengidentikkan kekuatan politik sebagai agama atau sebaliknya, Islam dijadikan alat sebagai upaya untuk mencapai kesuksesan politik. Kekuasaan politik bukan tujuan hidup manusia, tetapi hanya sebagai alat untuk mempermudah mencapai tujuan hidup yang lebih hakiki. Menurut Nurcholish Madjid bahwa sistem politik yang sebaiknya diterapkan di Indonesia ialah sistem yang tidak hanya baik untuk umat Islam saja, tetapi yang sekiranya juga akan membawa kebaikan untuk semua anggota masyarakat Indonesia.

Dalam pandangan Fiqh Siyasah Hubungan Islam dan negara tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an hanya memuat dasar-dasar atau prinsip-prinsip umum pemerinatahan Islam secara global. Ayat-ayat yang berhubungan dengan tata pemerintahan juga tidak banyak, ayat-ayat yang masih global ini kemudian dijabarkan oleh Nabi dalam sunnahnya, baik perkataan,

perbuatan maupun takrir atau ketetapan. Namun demikian, penerapannya pun bukan harga mati. Al-qur'an dan Sunnah menyerahkan sepenuhnya kepada umat Islam untuk membentuk dan mengatur pemerintahan serta menyusun konstitusi yang sesuai dengan perkembangan zaman dan konteks sosial masyarakatnya. Dalam hal ini, dasar-dasar hukum Islam lainnya seperti *ijma*, *qiyas*, *maslahah mursalah* dan *urf* memegang peranan penting dalam perumusan konstitusi. Hanya saja, penerapan dasar-dasar tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip pokok yang telah digariskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Dari penjelasan di atas, pemikiran hubungan Islam dan negara yang perlu disadari adalah bahwa Islam tidak pernah menentukan bentuk dan pola tertentu suatu negara yang harus dipraktikkan oleh umat Islam. Bahkan dalam negara Madinah yang dipimpin oleh Nabi saja, tidak terdapat klausul Islam sebagai agama negara dalam piagam Madinah. Se jauh tidak bertentangan dengan semangat ajaran Islam, maka bentuk negara dan sistem politik manapun dapat diterima oleh Islam. Namun mendirikan negara merupakan kewajiban umat Islam. Negara merupakan alat bagi umat Islam untuk dapat melaksanakan ajaran-ajaran Islam, sehingga tujuan syara menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan dapat tercapai dalam masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hubungan Islam dan negara adalah suatu distorsi hubungan proporsional antara Islam dan negara. Negara merupakan aspek kehidupan duniawi yang dimensinya rasional dan kolektif. Sedangkan Islam merupakan segi lain yang dimensinya spiritual dan individual. Meskipun antara Islam dan negara tidak dapat dipisahkan, karena Islam merupakan landasan hidup dan menjadi kultur kehidupan masyarakat dalam bernegara, namun Nurcholish Madjid menolak tegas konsep negara Islam, terutama dalam konteks keindonesiaan. Oleh karena itu, negara Indonesia bukanlah negara agama dan bukanlah negara sekuler. Nurcholish Madjid menegaskan, yang penting adalah bagaimana menjadikan nilai-nilai Islam sebagai etika politik nasional sehingga meskipun tanpa menyebut simbol Islam, substansi Islam itu sendiri sudah terserap ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Pandangan Fiqh Siyasah terhadap pemikiran Nurcholish Madjid tentang hubungan Islam dan negara, dalam Al-Qur'an dan Sunnah menyerahkan sepenuhnya kepada umat Islam untuk membentuk dan mengatur pemerintahan serta menyusun konstitusi yang sesuai dengan perkembangan zaman dan konteks sosial masyarakatnya. Dalam hal ini,

dasar-dasar hukum Islam lainnya seperti *ijma*, *qiyas*, *istishan*, *maslahah mursalah*, dan *urf* memegang peranan penting dalam perumusan konstitusi. Hanya saja, penerapan dasar-dasar tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip pokok yang telah digariskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Meskipun demikian, Islam mengajarkan banyak nilai dan etika bagaimana seharusnya negara itu dibangun dan dibesarkan. Negara juga didirikan untuk melindungi manusia dari kewenangan-kewenangan satu golongan atau orang terhadap orang atau golongan yang lain. Negara mempunyai kekuatan dan kekuasaan memaksa agar peraturan-peraturan yang diciptakannya dapat dipatuhi sejauh tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam itu sendiri.

B. Saran

Kajian dan penelitian yang penulis lakukan dalam skripsi ini hanyalah sebagian kecil dari banyaknya pemikiran Nurcholish Madjid tentang relasi Islam dan negara dan bagaimana perspektif Fiqh Siyasah terhadap pemikiran Nurcholish Madjid tentang relasi Islam dan negara di Indonesia. Sehingga akan sangat baik dan bermanfaat apabila di masa yang akan datang adik-adik tingkat dapat mengkaji kembali pemikiran Nurcholish Madjid dari sisi yang lainnya yang kemudian dihubungkan dengan sistem politik di Indonesia, karena Nurcholish Madjid merupakan salah seorang pemikir politik Islam di Indonesia yang banyak melontarkan gagasan-gagasan yang berwawasan kebangsaan dan mempunyai pengaruh besar terhadap wacana kebangsaan dan keislaman di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Fachry, *Tharekat Nurcholis Jejak Pemikiran dari Pembaru Hingga Guru Bangsa*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Asshidique, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- As'ari, Deni Kurniawan, *Kamus Istilah Politik dan Kewarganegaraan*, Bandung: Irama Widya, 2006.
- Assyaukanie, Luthfi, *Ideologi Islam dan Utopia: Tiga Model Negara Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: Freedom Institute, 2011.
- Abd al-Raziq, Ali, *al-Islam wa Usul al-Hukm*, Terjemahan M. Zaid Su'di Yogyakarta: Paradigma, 2005.
- As-Shidiqie, Hasby, *Ilmu Kenegaraan dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- Azhari, M. Tahir, *Negara Hukum*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Amrusyi, Fahmi dalam Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung: Nusamedia, 2012.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Djazuli, Ahmad, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, Jakarta: PT GramediaPustaka, 2011.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2017.
- Efendy, Bahtiar, *Theology Baru Politik Islam: Pertautan, Agama, Negara dan Demokrasi*, Yogyakarta: Galang Pres, 2001.

Fatwa, A.M, *Satu Islam Multi Partai Membangun Integritas di Tengah Pluralitas*, Bandung: Mizan, 2000.

H.I, A.Rahman, *Sistem Politik Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.

Hidayat, Komaruddin Dalam Kata Pengantar, Nurcholis Madjid, *Islam Agama Peradaban Membangun Makna Relevansi Islam Dalam Sejarah*.

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia, 2014.

Kaurur, Rany, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Bandung: Taruna Grafika, 2009.

Khalid, Farid Abdul, *Fiqh Politik Islam*, Jakarta: AMZAH, 2005.

Muhtadi, Asep Saiful, *Komunikasi Politik Indonesia, Dinamika Islam Pasca ORBA*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.

Maksudi, Beddy Irawan, *Sistem Politik Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Malik, Deddy Djamaluddin, dan Idy Subandi Ibrahim, *Zaman Baru islam Indonesia Pemikiran dan Aksi Politik Abdurrahman Wahid, M. Amin Rais, Nurcholis Madjid, Jalaluddin Rahmat*, Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998.

Mustafa, Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Masudi, Masdar Farid, *Syarah UUD 1945 Perspektif Islam*, Jakarta: PT Pustaka Alvabert, 2013.

MPR RI, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 6 Agustus 2012.

Madjid, Nurcholish et.al, *Islam Universal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Madjid, Nurcholish, *Islam dan Politik dalam Jurnal Pemikiran Islam PARAMADINA*, Vol 1, No. 1, Juli-Desember 1998.

_____, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Cet ke-2. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992.

_____, *Suatu Tahapan Terhadap Masa Depan Politik Indonesia* dalam Prisma, Edisi, Jakarta 1984.

Mahendra, Yusril Ihza, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, dalam Harun Nasution, *Teologi Islam Rasional Apresiasi Terhadap Wacana Politik dan Praktis*, Jakarta: Ciputat Press, Cet ke-2, 2002.

Nata, Abudin, *Study Islam Komprehensif*, Jakarta: Kencana, 2011.

Nadroh, Siti, *Wacana Keagamaan dan Politik Nurcholish Madjid*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.

Pada sebuah kesempatan, Eki Sjahrudin menyebut bahwa kelas dan wibawa intelektual Nurcholis Madjid setara dengan Soejatmoko, Lihat Anas Urbaningrum, *Op.Cit*.

Rahman, Budhy Munawar, *Reorientasi Pembaruan Islam*, Jakarta: Democracy Project, 2011.

Suhelmi, Ahmad, *Polemik Negara Islam Soekarno vs Natsir*, Jakarta: Teraju, 2002.

Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.

Satriawan, Iwan, *Ilmu Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Syarief, Mujar Ibnu, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008.

Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tatanegara, Ajaran, Sejarah, Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1993.

Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015.

Saridjo, Marwan, *Cak Nur di antara Sarung dan Dasi dan Musdah Mulia Tetap Berjilbab*, Jakarta: Penamadani, 2005.

Tim Kajian Ilmiah Abituren, *Simbiosis Negara dan Agama Reaktualisasi Syari'at dalam Tata-nan Kenegaraan*, Kediri: Lirboyo, 2007.

Tahqiq, Nanang, *Politik Islam*, Jakarta: Prenada Media. 2009.

Urbaningrum, Anas, *Islam Demokrasi Pemikiran Nurcholis Madjid*, (Jakarta: Republika, 2004.

Zuhayli, Wahbah dalam Jajuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

